PELAKSANAAN MONITORING PADA PEMINJAMAN DANA BERGULIR DALAM MENGATASI KREDIT MACET (StudiKasusDinasTenagaKerja, Koperasidan UKM KabupatenBanyumas)

IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh :
NINGSIH RAHMAWATI
NIM. 1423203018

JURUSAN EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NINGSIH RAHMAWATI**

NIM : **1423203018**

Jenjang : **S.1**

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN MONITORING PADA PEMINJAMAN DANA BERGULIR DALAM MENGATASI KREDIT MACET (Studi Kasus Dinas Tenaga Kerja Koperasi Dan UKM Kabupaten Banyumas)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 26 Desember 2018

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

TGL 20

51AFF121055211

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Ningsih Rahmawati

NIM. 1423203018

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

IAIN PURWOKERTO

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

PELAKSANAAN MONITORING PADA PEMINJAMAN DANA BERGULIR DALAM MENGATASI KREDIT MACET (Studi Kasus Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas)

Yang disusun oleh Saudari **Ningsih Rahmawati NIM. 1423203018** Jurusan/Program Studi **Ekonomi Syariáh** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis** tanggal **10 Januari 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E) oleh Sidang Penguji Skripsi**

Ketua Sidang/Penguji

Iin Solikhin, M.Ag.
NIP. 197208052001121002

Sekretaris Sidang/Penguji

Rahmini Hadi, SE., M.Si.
NIP. 197012242005012001

Pembimbing/Penguji

Dewi Laela Hilyatin, SE., M.S.I.
NIP. 198511122009122007

Purwokerto, Januari 2019
Mengetahui/Mengesahkan
Dekan

Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M.
NIP. 19680403 1994031004

IAIN PURWOKERTO

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto

Di-

Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Ningsih Rahmawati NIM. 1423203018 yang berjudul :

Pelaksanaan Monitoring Pada Peminjaman Dana Bergulir Dalam Mengatasi Kredit Macet (Studi Kasus Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas).

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (.S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 26 Desember 2018

Pembimbing

Dewi Laela Hilyatin, SE., M.S.I.

NIP. 198511122009122007

PELAKSANAAN MONITORING PADA PEMINJAMAN DANA BERGULIR DALAM MENGATASI KREDIT MACET
(Studi Kasus Dinas Tenaga Kerja Koperasi Dan UKM Kabupaten Banyumas)

Ningsih Rahmawati
1423203018
E-mail : ningsih.rahmawati77@gmail.com
Jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Dana pinjaman bergulir adalah dana pinjaman yang bersumber dari APBD yang dikelola dan diperuntukan secara khusus, dalam jangka waktu tertentu dimana uang pengembalian angsuran yang terkumpul dapat disalurkan kembali. Penerima pinjaman bergulir harus membentuk kelompok usaha kecil mikro yang memiliki fungsi bersama-sama mengemban tanggungjawab secara terorganisir yang sifatnya tanggung renteng. Sebagai salah satu kelompok kerja penyalur pinjaman bergulir, bidang UKM pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas melaksanakan prosedur penyaluran pinjaman dana bergulir sampai proses angsuran pengembalian dengan program monitoring kepada kelompok usaha mikro kecil peminjam dana bergulir dalam rangka mengurangi kredit macet.

Penelitian ini mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan monitoring pada peminjaman dana bergulir dalam mengatasi kredit macet, dengan jenis penelitin lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan tujuan mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan tentang bagaimana pelaksanaan monitoring pada peminjaman dana bergulir dalam mengatasi kredit macet.

Dari hasil penelitian pelaksanaan monitoring pada peminjaman dana bergulir di Dinas Tenaga Kerja, koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas menunjukkan betapa pentingnya pelaksanaan monitoring baik dalam model *preventive control* maupun model *repressif control* peluncuran dana dengan tujuan mengetahui jelas jenis usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro kecil, kemudian metode yamg digunakan adalah metode pengawasan *on desk monitoring*, *on site monitoring* dan *annual review* bagi perkembangan usaha mikro kecil serta mendorong kelancaran pengangsuran pinjaman dana bergulir bagi kelompok usaha kecil dan mikro kabupaten Banyumas.

Kata Kunci : Monitoring, Pinjaman Bergulir, Kredit Macet.

IMPLEMENTATION OF MONITORING ON FUND LENDING TO CLEARING UNRESOLVED CREDIT
(Study case in Department of Worker, Cooperation, and SME of Banyumas Regency)

Ningsih Rahmawati
1423203018
E-mail : ningsih.rahmawati77@gmail.com
Department of Islamic Economics and Islamic Business
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRACT

A revolving loan is a funding loan sourced from APBD budget whose managed and allocatied significantly in a period of time which is the return and credit cauld to belended any more. The loan receveir should to make a group of SME's in which has the similarities function to responsible in organization by joint venture. As one of lending distributor groups, SME's sector which are managed by Department of Worker, Cooperation, and SME of Banyumas Regency needs to fulfill the fund lending procedure until credit process has done by using monitoring program in groups of SME's as the lender of resolving loan to minimize the resolved credit.

This research are using the problems statement likely how the monitoring of revolving tender able to resolue the unsolved credit through field research in qualitative approach method. This research are collecting data by observation, interview and documentation and descriptive analysis purposed to describe the data who writer collected about how the monitoring on revolving loan able to minimize the unresolved credit.

From the results of research on the monitoring of revolving fund lending in the Manpower Office, cooperatives and SMEs in Banyumas Regency showed the importance of monitoring both the preventive control model and the repressive model of fund launch control with the aim of clearly identifying the types of businesses carried out by small micro-entrepreneurs. The method used is the on-desk monitoring, on-site monitoring and annual review methods for the development of small micro enterprises and encourages the smooth installment of revolving fund loans for small and micro business groups in Banyumas district.

Keyword : monitoring, revolving loans, unresolved credit.

MOTTO

Hari ini, pilih dua dari masalah terbesar Anda, dan carilah tempat perpisahan pada masing-masing masalah itu. Ketika Anda berpisah, Pilihlah cinta sebagai cara menyenbuhkan. Berikan cinta dan maaf, yang menciptakan ikatan dan menyembuhkan perpisahan.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Allah SWT, terimakasih ya Allah selalu mendengarkan dan memberi petunjuk disetiap langkah baik hamba, terimakasih atas segala nikmat sehat sehingga hamba mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar, semoga kelancaran dan kemudahan dalam setiap niat baik hamba selalu kau ridhai dan berkahi seterusnya,amiin...
2. Almamaterku Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.
3. Kedua orang tua kandung saya yang selalu saya cintai dan hormati, Bapak Suharto dan Ibu Kamilah, sekalipun kita tidak satu atap ketauladanan serta kasih sayang kalian selalu menjadi kiblat penulis menjadi seorang anak yang kuat, pintar dan solihah. Beliau yang selalu memberi senyum kekuatan serta Do'a yang tiada putus dengan menyebut namaku disetiap Do'a mereka sehingga mampu menepakkan kaki penulis di IAIN Purwokerto tercinta.
4. Kedua orang tua angkat saya yang selalu saya cintai dan hormati, Bapak Rohidin dan Ibu Kuni'ah, beliau adalah orang tua angkat yang mencurahkan segala kekuatannya untuk penulis untuk menjadi wanita hebat, jerih payah dari hasil keringatnya selalu terkucur untuk membiayayai penulis mengenyam pendidikan yang lebih baik, Do'a serta perhatian kepada penulis untuk menyelesaikan S1 tidak pernah putus,.. terimakasih atas segalanya Pak Bu,..semoga Allah membalas semua kebaikan Bapak Ibuku tercinta.
5. Kakak saya Muhammad Naqib, Akhmad Jaelani, Siti Khalifah dan Adik saya Siti Amaliya Rizqi kalian adalah acuan semangat penulis yang selalu mengaliri setiap langkah pengerjaan skripsi ini, membalikkan hangatnya kasih sayang yang selalu penulis rindukan, mengajarkan kesederhanaan dan kekolektifan kekeluargaan,.. terimakasih semuanya semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam hidup kalian.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha’	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Źal	Ź	zet (dengan titik di atas)
ر	ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	d’ad	d’	de (dengan titik di atas)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Żа	Ż	zet (dengan titik di atas)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap.

متعددة	Ditulis	Muta’addidah
عدة	ditulis	‘iddah

Ta’marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak dierlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

a. Bila diikuti dengan kata sanadang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karamah al-auliya’

b. Bila ta'marbutoh hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* *ditulis* dengan

زكاة لفطر	Ditulis	Karamah al-auliya'

Vokal pendek

َ	Fathah	ditulis	a
ِ	Kasrah	ditulis	i
ُ	Dammah	ditulis	u

Vokal panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	a
	جاهلية	ditulis	Jahiliyah
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	a
	تنس	ditulis	tansa
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	karim
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	u
	فروض	ditulis	furud

Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	qaul

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan denganapostrof

أأنتم	ditulis	a’antum
أعدت	ditulis	u’iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la’in syakartum

c. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah

القرأن	ditulis	al-qur’an
القياس	ditulis	al-qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiayyah ditulis dengan menggnukan harus syamsiyyah yag mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	ditulis	As-sama
الشمس	ditulis	Asy-syams

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوئ الفروض	ditulis	Zawi al-furud
أهل السنة	ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Alloh Swt yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Monitoring Pada Peminjaman Dana Bergulir Dalam Mengatasi Kredit Macet (Studi Kasus Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas)". Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Saw. Sang revolusioner Umat Islam.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, bantuan, dan dukungan dari beberapa pihak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.,Rektor IAIN Purwokerto.
2. Dr. H. Munjin, M. Pd.I., Wakil Rektor I IAIN Purwokerto.
3. Drs. H. Asdlori, M. Pd.I., Wakil Rektor II IAIN Purwokerto
4. Dr. H. Supriyanto, Lc., M.S.I., Wakil Rektor III IAINPurwokerto.
5. Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M., DekanFakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.
6. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I., Ketua JurusanEkonomi Syariah IAIN Purwokerto serta selaku Pembimbing, terima kasih karena telah menuangkan pemikiran serta masukan yang membangun dalam membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan staf administrasi IAIN Purwokerto.
8. telah memberikan motivasi dan bantuan sehingga terwujud skripsi ini.Ayah kandung adinda Bapak Suhartodan Kamilah terima kasih atas pesan, do'a serta support yang luar biasa terimakasih atas semua perhatianya dan kasih sayangnya yang telah diberikan selama ini.
9. Ayah angkat adinda Bapak Rohidin dan Ibu Kuni'ah yang selalu memberi perhatian, kasih sayang, semangat serta do'a adinda dalam menempuh

pendidikan selama ini, terimakasih semoga Allah selalu menyayangi Ayah Ibu adinda.

10. Kakak Adinda Muhammad Naqib, Akhmad Jaelani, Siti Khalifah yang selalu menjadi suri tauladan adinda selama ini dan adik kesayangan Siti Amaliya Rizki yang selalu memberi support dan candaan yang manis. Semoga Allah selalu sayang dan memberkahi kehidupan keluarga adinda.
11. Bapak Hari Harbani, Ibu Ida Zuraida dan Riza Dwi Anggoro yang memberi kasih sayang serta sabar dalam mendidik adinda.
12. Pihak Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas yang senantiasa membantu dan mempermudah dalam pengerjaan skripsi ini.
13. Pihak bidang UKM yang selalu membantu dan mempermudah penulis dalam menyelasaikan skripsi ini.
14. Ibu Kepala Bidang UKM Rozani Umdati, SH. Yang selalu siap membantu penulis menyelasaikan skripsi ini.
15. Bapak Indra Basuki selaku analis bidang usaha mikro kecil dan menengah yang selalu siap membantu penulis menyelasaikan skripsi ini.
16. Teman-teman seperjuangan yang

Semoga Allah berkenan membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada Penulis.Dengan terselesaikannya skripsi ini, Penulis menyadari masih banyak terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan Penulis untuk mendapatkan masukan agar apa yang tertulis dalam skripsi ini dapat memberikan sumbangan, menjadi bahan masukan dan memberikan manfaat bagi semua pihak. *Amiin ya robbal 'alamiin*.

Purwokerto, 26 Desember 2018

Penulis,

Ningsih Rahmawati

NIM. 14232030318

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
PENGESAHAN ..... **iii**
NOTA DINAS PEMBIMBING ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
MOTO ..... **vii**
PERSEMBAHAN ..... **viii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **xiv**
DAFTAR ISI ..... **xvi**
DAFTAR TABEL ..... **xix**
DAFTAR GAMBAR ..... **xx**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xxi**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Definisi Operasional 7
C. Rumusan Masalah 9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9
E. Kajian Pustaka 10
BAB II LANDASAN TEORI
A. Monitoring 19
1. Pengertian Monitoring 19
2. Fungsi dan Tujuan Monitoring 20
3. Metode-metode Monitoring 22
B. Peminjaman Dana Bergulir 25
1. Pengertian Peminjaman Dana Bergulir 25
2. Landasan Hukum Peminjaman Dana Bergulir 26

3. Syarat Peminjaman Dana Bergulir 26
C. Kredit Macet 27
1. Pengertian Kredit Macet 27
2. Faktor-faktor Penyebab Kredit bermasalah 28
3. Cara Mengatasi Kredit Bermasalah 29
D. Landasan Teologis 31
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 34
C. Subjek dan Objek Penelitian 35
D. Jenis dan Sumber Data 35
E. Teknik Pengumpulan Data 36
F. Teknik Analisis Data 37
G. Uji Keabsahan Data 39
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Dinnakerkop dan UKM Kabupaten Banyumas 41
1. Sejarah Singkat Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas 41
2. Visi dan Misi Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas 41
3. Bidang UKM 42
4. Struktur Organisasi Bidang UKM 43
5. Fungsi dan Tugas 43
B. Prosedur Peminjaman Dana Bergulir 46
C. Analisis Pelaksanaan Monitoring pada Peminjman Dana Bergulir 49
1. Proses Pelaksaan Monitoring pada Peminjaman Dana Bergulir 49
2. Mengatasi Kredit Macet 59
D. Upaya Bidang UKM dalam Mengatasi Kredit Macet 65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 71

B. Saran..... 72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data *Non Perfoming Loan* Kredit Dana Bergulir

Tabel 2Penelitian Terdahulu

Tabel 3Data Rekap Penerimaan Angsuran Kredit Angsuran Bergulir

Tabel 4Rekap Pinjaman Berdasar Kolektabilitas

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Proses Peminjaman Dana Bergulir Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas
Gambar 2 Surat Pernyataan

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Dengan Bidang UKM Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas

Lampiran 2 Rekap dan Perkembangan Penerimaan Angsuran Kredit Bergulir Per Desember 2013

Lampiran 3 Rekap Penerimaan Angsuran Kredit Bergulir Masyarakat Miskin Produktif Tahun 2007 Januari 2008 s.d Desember 2013

Lampiran 4 Rekap dan Perkembangan Penerimaan Angsuran Kredit Bergulir Per Januari 2014

Lampiran 5 Rekap Penerimaan Angsuran Kredit Bergulir Masyarakat Miskin Produktif Tahun 2007 Januari 2008 s.d Januari 2014

Lampiran 6 Laporan Saldo Akhir Rekening Pokok DPPKAD Per Desember 2016

Lampiran 7 Rekap Pinjaman Berdasarkan Kantor Per Desember 2016

Lampiran 8 Laporan Saldo Akhir Rekening Pokok DPPKAD Per September 2017

Lampiran 8 Rekap Pinjaman Berdasarkan Kantor Per September 2017

Lampiran 9 Nominatif Kredit Per September 2017

Lampiran 10 Laporan Saldo Akhir Rekening Pokok DPPKAD Per April 2018

Lampiran 11 Rekap Pinjaman Berdasarkan Kantor Per April 2018

Lampiran 12 Rekap Pinjaman Berdasar Kolektabilitas 30 April 2018

Lampiran 13 Risalah Hasil Perjalanan Dinas

Lampiran 14 Daftar Kelompok Penerima Dana Pinjaman Bergulir Bagi Pelaku UKM Kab. Banyumas Tahap I

Lampiran 15 Daftar Kelompok Penerima Dana Pinjaman Bergulir Bagi Pelaku UKM Kab. Banyumas Tahap II

Lampiran 16 Daftar Kelompok Penerima Dana Pinjaman Bergulir Bagi Pelaku UKM Kab. Banyumas PPKL JENSUD PRATISTHA HARSA

Lampiran 17 Permohonan Dana Bergulir APBD Bagi UMKM Kab. Banyumas
Lampiran 18 Jadwal Monitoring Dana Bergulir
Lampiran 19 Dokumentasi
Lampiran 20 Surat Rekomemdasi Ijin Penelitian
Lampiarn 21 Blanko Bimbingan Skripsi
Lampiran 22 Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 23 Surat Permohonan Ijin Riset Individual
Lampiran 24 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi.
Lampiran 25 Surat Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi.
Lampiran 26 Surat Bimbingan Skripsi.
Lampiran 27 Surat Rekomendasi Seminar Proposal Skripsi
Lampiran 28 Surat Keterangan Lulus Semua Mata Kuliah.
Lampiran 29 Berita Acara Ujian Proposal Skripsi.
Lampiran 30 Surat Keterangan Ujian Komprehensif.
Lampiran 31 Sertifikat OPAK.
Lampiran 32 Sertifikat Bahasa Arab.
Lampiran 33 Sertifikat Bahasa Inggris.
Lampiran 34 Sertifikat BTA PPI.
Lampiran 35 Sertifikat Ujian Akhir Komputer.
Lampiran 36 Sertifikat PPL.
Lampiran 37 Sertifikat KKN.
Lampiran 38 Sertifikat-sertifikat Kegiatan

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya perekonomian yang kreatif dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat memunculkan generasi milenial sebagai penggerak roda perekonomian di era globalisasi ini.Tentu kemajuan perekonomian tidak selalu merata, sehingga memunculkan masalah-masalah baru dan up-to-date.Dari masa perkembangan manusia, dengan berbagai masalah yang timbul karena pada dasarnya manusia sangat dinamis dan tetap bergerak mencari kemajuan yang tidak terbatas.

Dasarnya adalah kita disuruh berusaha, disuruh berpikir, disuruh mendapatkan jalan hidup, disuruh menghidupkan Agama jangan sampai mati karena dibiarkan, tidak diberi jiwa masa, jiwa keadaan dan jiwa bersemangat kekuatan, dan disuruh mencari jalan keluar dari kesempatan. [1] Martabat kemanusiaan dapat diwujudkan dengan sisi kemanusiaan yang bermasyarakat, bermoral dan berbudaya. Sehingga menjadi manusia yang bermartabat memerlukan dukungan dari ruang lingkup masyarakat itu sendiri agar terhindar dari penyakit masyarakat yang kadangkala liar dengan penuh ambisi. Banyak sekali penyakit yang ada di masyarakat, terkait dengan pengembangan usaha demi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan didalam masyarakat bermunculan sosok-sosok rentenir yang menjelma sebagai pahlawan pengambil kesempatan dalam kesempitan, sehingga muncul penyakit riba.

Dalam konteks ekonomi Islam, Prawiranegara menganjurkan dua prinsip: pertama, kredit dengan tingkat bunga yang wajar sebagai imbalan terhadap

[1] Fuad Mohd Fachruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi, perseroan dan Asuransi*, (Bandung: PT Alma'arif, 1993), hlm. 7

pemakaian uang, dan kedua, perdagangan yang adil (*fair trade*) kedua prinsip tersebut ibarat dua sisi mata uang yang sering terkait satu sama lain.[2]

Larangan terhadap bunga pinjaman dalam ekonomi Islam didasarkan pada pemaknaan terhadap larangan riba yang secara berulang-ulang disebut dalam Al-Qur'an, mayoritas ulama mendefinisikan riba sebagai setiap tambahan yang dipungut dari debitur, maka dengan serta merta kemudian dipahami bahwa bunga pinjaman pada hakikatnya adalah tambahan terhadap hutang pokok yang dipungut dari debitur, maka dengan serta merta kemudian dipahami bahwa bunga pinjaman sama dengan riba yang dilarang dalam Qur'an. Pemaknaan terhadap larangan riba seperti inilah yang kemudian menjadi paradigma moneter dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu larangan terhadap bunga pinjaman, atau sering disebut *zero rate of interest* (bunga nol persen), seolah menjadi aksioma yang mendasari sistem ekonomi Islam.[3]

Riba semata-mata sifatnya konsumtif. Ia dimakan dari orang yang meminjam uang untuk melepaskan sesak hidupnya. Karena sangat susahnya, ia meminjam dengan tiada mengindahkan beban yang dipikulnya. Asal ia dapat meminjam, diterimanya bayaran bunga sampai berpuluh dan beratus persen jumlahnya setahun, sekalipun ia tahu, bahwa pokok hutang serta bunganya yang begitu berat tidak akan terbayar olehnya dengan tiada menghabiskan hartanya kelak, ia mau juga, sebab sesaknya hidupnya tidak terkira. Tidak jarang terjadi, sawah-ladang orang habis terjual dan tergadai untuk membayar bunga hutang yang tidak kunjung berakhir. Di masa dahulu kala sampai ke Zaman Tengah, pinjaman konsumtif sering menjadi sebab hilangnya kemerdekaan diri seseorang. Utang uang yang tidak terbayar ditebus dengan menyerahkan diri sebagai budak kepada orang yang memberi utang.[4] Fenomena riba seperti ini sangat memprihatinkan

IAIN PURWOKERTO

---

[2] Jamal Abdul Aziz, "Ekonomi Islam Minus Pengharaman Bunga", Penyunting: Ahmad Dahlan, Vol.2 (Purwokerto: Asosiasi Dosen Ekonomi Islam (ADEIS), 2014, hlm. 220.

[3] *Ibid*, hlm. 198-199.

[4] Fuad Mohd Fachruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi, perseroan dan Asuransi*, (Bandung: PT Alma'arif, 1993), hlm. 24.

bagi masyarakat menengah kebawah yang memiliki cara berpikir instan tanpa mengantisipasi risiko jangka panjang ketika harus masuk kedalam dunia buka lubang tutup lubang.

Kemudian berbeda lagi dengan rente, rente itu adalah sebagian daripada keuntungan yang diperoleh dengan bantuan uang orang lain itu. Oleh karena uang pinjaman itu menolong memperbaiki keadaan hidup si peminjam, maka ia mau membayar rentenya. Bagi orang yang meminjamkan, perhitungannya didasarkannya kepada kemungkinan mendapat laba daripada uangnya itu. Uangnya itu dapat dipergunakannya untuk berniaga atau dapat dibelikannya rumah, yang boleh dipungut sewaanya. Jika uangnya itu dipinjamkannya, ia tak dapat lagi berniaga dengan itu, tak dapat dibelikannya akan rumah yang menghasilkan uang sewaan baginya. Oleh karena itu ia meminta rente , sebagai ganti keuntungannya yang hilang.[5]

Ada anggapan terkait riba dan rente bagi masyarakat bahwa keduanya sama-sama bunga, rente tidak lain merupakan riba, namun ada yang perlu dipahami untuk dibedakan antara keduanya bahwa rente adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan bank dan sebagainya atas jasanya telah meminjamkan uang untuk modal dalam menjalankan serta mengembangkan usahaya. Kemudian riba merupakan pemerasan kepada orang yang kesulitan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan primernya.

Jelaslah, bahwa meminjamkan uang dengan memungut uang bunga bukanlah didasarkan kepada usaha tolong-menolong, akan tetapi merupakan usaha mencari keuntungan belaka tanpa menangung suatu risiko. Uang yang dipinjamkan terjamin tidak akan hilang, uang bunga dalam waktu-waktu yang telah ditetapkan mengalir masuk kantong yang punya uang sambil “bersila tipis”.[6] Oleh karena bahanya riba dan rente, tentu pemerintah di Indonesia

IAIN PURWOKERTO

[5] Fuad Mohd Fachruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi, perseroan dan Asuransi*, (Bandung: PT Alma’arif, 1993), hlm. 25.

[6] *Ibid*..., hlm. 52.

mengusahakan beberapa cara untuk mencegah penyakit riba dan rente baik melalui lembaga keuangan yang disyariahkan maupun lembaga-lembaga dinas tertentu sebagai penyalur aspirasi serta pendukung dari kemajuan tingkat kesejahteraan ekonomi di suatu daerah.

Usaha mikro termasuk dalam bagian usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mempunyai peran yang cukup penting dalam membangun perokonomian di Indonesia, terbukti di saat krisis ekonomi melanda Indonesia, pemerintah sangat mengandalkan peran UMKM untuk memperkecil dampak negatif dari krisis ekonomi, UMKM merupakan solusi untuk menyerap tenaga kerja yang diberhentikan akibat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan juga memberikan sumber pendapatan tambahan bagi tenaga kerja.[7]Di Negara seperti Korea dan China yang mempunyai sektor UKM kuat, kondisi ekonomi tersebut lebih tahan terhadap krisis dan tahan terhadap distorsi-distorsi yang menurunkan perkembngan ekonomi.[8]

Definisi dan karakteristik usaha kecil dan mikro disetiap Negara tidak ada yang sama, masing-masing Negara bisa memiliki definisi dan karakteristik yang berbeda-beda. Namun dari segi operasionalnya, ada banyak pembeda antara usaha mikro, kecil, dan juga menengah. Penanganan dan aturan yang terkait dengan usaha mikro, dan kecil juga beragam. Di Negara dengan industri yang sudah maju, entitas legal usaha mikro sudah diatur melalui undang-undang. Namun di beberapa Negara berkembang bahkan entitas legalnya tidak diatur. Usaha yang demikian ini lazim disebut sebagai usaha sektor informal.[9]

Keberadaan UMKM diharapkan dapat memberi kontribusi yang cukup baik terhadap upaya mengatasi masalah-masalah seperti kemiskinan, pengangguran, urbanisasi serta kesenjangan sosial yang terjadi akibat perbedaan ekonomi.

---

[7]V. Wiratna Sujarweni, Lila Retnani Utami, "Analisis Dampak Pembiayaan Dana Bergulir KUR (Kredit Usaha Rakyat) Terhadap Kinerja UMKM", (Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) Vol. 22 No.1, *Universitas Respati Yogyakarta*, 2015), hlm. 11-12.

[8] Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011), hlm. 3.

[9] Wawan Dhewanto dkk, *Manajemen Inovasi untuk Usaha Kecil dan Mikro*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 20.

IAIN PURWOKERTO

Pemerintah meluncurkan program penguatan finansial berbasis partisipasi masyarakat melalui dana yang disalurkan dengan pola bergulir adalah cara memanfaatkan bantuan kepada Koperasi Usaha Kecil Menengah (KUKM), dana bergulir ini diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan produksi dan penjualan sebagai implikasi dari peningkatan dari kapasitas produksi, penyerapan tenaga kerja yang lebih besar, serta stimulasi pemanfaatan sumber daya dan faktor produksi secara lebih optimal.[10]

Adapun maksud dari pengelolaan dana bergulir adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pembiayaan UMKM, dan tujuan dari pengelolaan dana bergulir adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM, sebagai pengembangan investasi daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperluas penciptaan lapangan usaha serta menumbuhkan wirausaha baru dalam penyerapan tenaga kerja (Pengelolaan Dana Bergulir, 2013).[11] Kemudian untuk mendapatkan hasil yang diharapkan atas prngelolaan dana bergulir tersebut, maka pemerintah harus memperhatikan pelaksanan bantuan dana bergulir sehingga dapat terciptanya output yang diharapkan yaitu untuk memperkuat modal para pelaku UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Banyumas merupakan salah satu kabupaten/kota yang mendapatkan sasaran dana bergulir, yang penyaluran dana pinjaman bergulir bagi UKM tersebut di atur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 67 Tahun 2010, karena cukup banyak masyarakat di Kabupaten Banyumas yang berwirausaha demi menunjang dan mecukupi perekonomian mereka.

Bantuan bergulir seperti ini sudah ada sejak tahun 2007 di Kabupaten Banyumas, yang kemudian diteruskan, ditingkatkan dan diperbaiki oleh

---

[10] Achma Hendra Setiawan, Tri Wahyu Rejekiningsih,"Dampak Program Dana Bergulir Bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM)", (Aset Vol. 11 No. 2, *Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro*, 2009), hlm. 109.

[11] Chintya Fibri Asmara, "Implementasi Bantuan Dana Bergulir Bagi Pelaku Usaha", (Naskah Publikasi, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2018), hlm. 5.

IAIN PURWOKERTO

pemerintah sekarang dengan adanya perubahan atas peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 tentang tata cara penyaluran dana pinjaman bergulir bagi pelaku UKM Kabupaten Banyumas. Dengan melakukan perbaikan berupa penyaluran dana melalui PD BPR BKK Purwokerto, tidak dipungut biaya administrasi dan mewajibkan peminjam dana bergulir yang bersifat kelompok. Selain itu, bunga pinjaman sebesar 2% pertahun.

Tabel 1
Data Non Perfoming Loan Kredit Dana Bergulir Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kabupaten Banyumas Periode 2013-2018

Tahun	Jumlah Rekening	Disalurkan	Bakidebet	Jumlah Tunggakan	NPL
Desember 2013	435	8.020.000.000	3.500.105.379	1.664.627.051	17,8
Januari 2014	435	8.020.000.000	3.371.538.835	1.707.387.973	18,2
Desember 2016	491	9.510.000.000	2.416.350.471	2.758.991.681	97,01
September 2017	524	10.731.000.000	3.408.480.545	2.824.684.072	69,80
April 2018	350	11.786.500.000	3.963.072.443	2.433.755.978	65,22

Sumber : Hasil Rekap PD BPR BKK Purwokerto

Terkait dengan pengucuran dana bergulir bagi pengusaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Banyumas, maka Tim POKJA bidang UKM melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap dana yang telah disalurkan. Dengan adanya pelaksanaan monitoring sebagai bentuk pengawasan, evaluasi serta pembinaan untuk dana yang dipinjamkan pada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro kecil sangat diharapkan mampu meminimalisir adanya kredit macet. Beberapa upaya yang dilakukan untuk memantau kredit macet serta mengetahui penyebabnya baik dari pengurus maupun anggota kelompok peminjam yang tidak mengangsur ke BPR BKK setempat, ketika sudah diketahui hasilnya kelompok usaha mikro kecil yang meminjam dana akan diberi pengawasan berupa

IAIN PURWOKERTO

pembinaan yang intens sampai kelompok usaha mikro kecil tersebut mampu melunasi peminjamannya tersebut.

Pelaksanaan monitoring di bidang UKM pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas dilaksanakan setiap hari sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, oleh karena pelaksanaan monitoring sangat penting sebagai kegiatan evaluasi dan pembinaan setelah penerimaan dana bergulir bagi pengusaha mikro kecil dan menengah daerah Banyumas dalam rangka pengendalian kredit macet, maka peneliti tetarik untuk meneliti **Pelaksanaan Monitoring Pada Peminjaman Dana Bergulir dalam Mengatasi Kredit Macet di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas.**

B. Definisi Operasional

1. Monitoring

   Pengawasan kredit adalah kegiatan pengawasan/monitoring terhadap tahapan-tahapan proses pemberian kredit, pejabat kredit yang melaksanakan proses pemberian kredit serta fasilitas kreditnya.[12]

   Monitoring adalah proses pengamatan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM mulai dari pengajuan permohonan pinjaman dana bergulir dengan proposal samapai pelunasan peminjaman dana tersebut untuk menjamin semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana.[13]

   Pelaksanaan monitoring dilakukan sebagai bentuk pembinaan bagi penerima dana bergulir UKM Kabupaten Banyumas.

2. Peminjaman Dana Bergulir

   Dana bergulir adalah dana yang bersumber dari APBD yang dipinjamkan kepada koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah sebagai bagian dari peran fasilitas pemerintah daerah dalam mengembangkan

IAIN PURWOKERTO

---

[12] Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN, 2003), hlm 230-231.

[13] Wawancara langsung dengan Bapak Indra Basuki sebagai analis dunia usaha mikro kecil dan menengah Kabupaten Banyumas Pada tanggal 04 Juni 2018 Pukul 15:22.

koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, untuk dibayarkan kembali kepada pemerintah daerah dalam waktu yang telah ditentukan. Dana bergulir, selain bersumber dari APBD juga berasal dari laba dari pinjaman bergulir itu sendiri. Jadi laba yang diperoleh kemudian digulirkan kembali kemasyarakat.[14]

Dana bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga (Keuangan, 2008).[15]

3. Kredit Macet

Kredit macet atau problem loan adalah kredit yang mengalami Kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur.(Siamat, 1993).

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani "*credere*" yang berarti kepercayaan, oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau semua badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang atau jasa (Thomas. S, dkk, 1998:12).[16]

IAIN PURWOKERTO

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penlitian dalam teoritisasi data adalah suatu pernyataan yang mengidentifikasi fenomena yang diteliti.[17]

---

[14] Wawancara dengan staff penanggungjawab pelaksanaan monitoring bidang UKM

[15] Chintya Fibri Asmara, "Implementasi Bantuan Dana Bergulir Bagi Pelaku Usaha", (Naskah Publikasi, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2018), hlm. 3.

[16] W Nur, "kajian Pustaka Pengertian Kredit Macet," eprints.uny.ac.id, 2012, diakses 26 April 2018 Pukul 15;33.

[17]Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 27.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan monitoring pada peminjaman dana bergulir dalam mengatasi kredit macet bidang UKM di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana upaya bidang UKM dalam mengatasi pelaku UKM yang mengalami kredit macet dalam penggunaan dana bergulir?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan suatu sistematika, metodologi ilmiah dengan tujuan untuk memperoleh sesuatu yang baru atau asli dalam memecahkan suatu masalah yang setiap saat dapat timbul dimasyarakat. Kebaruan atau keaslian dapat dipandang dari hasil yang diperoleh, bahan atau materi yang dipergunakan, cara atau alat yang dipergunakan, satu dengan yang lain dapat berkaitan.[18]

Tujuan merupakan arah dan sasaran yang harus dicapai oleh setiap tindakan. Dengan demikian tujuan memegang peranan yang sangat penting dan harus dirumuskan dengan jelas, tegas dan mendetail, karena tujuan merupakan jawaban tentang masalah yang akan diteliti.[19]

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan monitoring pada peminjaman dana bergulir dalam mengatasi kredit macet bidang UKM di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kabupaten Banyumas
   b. Untuk mengetahui bagaimana upaya bidang UKM dalam mengatasi pelaku UKM yang mengalami kredit macet dalam menggunakan dana bergulir.
2. Manfaat Penelitian

IAIN PURWOKERTO

[18] Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2012), hlm. 111.

[19] Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitati-Kuantitatif*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 51-52.

a. Bagi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM membantu mensosialisasikan lembaganya agar semakin banyak lembaga keuangan mikro yang mengetahui adanya lembaga yang memberikan pembiayaan pada UKM.
b. Bagi penulis dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai bagaimana peran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM dalam menyalurkan serta melakukan pengawasan pada peminjaman dana bergulir untuk mengatasi masalah kredit macet di UKM Kabupaten Banyumas.
c. Bagi pihak-pihak yang memerlukan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai lembaga yang memberikan pembiayaan di luar lembaga keuangan bank dan non bank.

E. Kajian Pustaka

Dalam buku yang berjudul Monitoring dan Evaluasi cetakan Lembaga Administrasi Negara sebagai bahan diklat teknis "penyusunan standar pelayanan publik" menjelaskan bahwa Monitoring digunakan untuk menilai pelaksanaan penerapan secara rutin untuk mengumpulkan data yang diperlukan agar pelaksanaan penerapan standar pelayanan tetap berada dalam kerangka yang diinginkan (*on track progress assessment*).[20]

Prof. Dr. Sondang P. Siagian, MPA dalam bukunya *Manajemen Stratejik* menjelaskan Pengawasan ialah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagain kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.[21]

Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Syariah dalam Praktik* menyebutkan bahawa Pengawasan dalam

IAIN PURWOKERTO

[20] Lembaga Administrasi Negara, *Monitoring dan Evaluasi*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2005), hlm. 13.
[21] Sondang P. Siagian, *Manjaemen Stratejik,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), hlm. 258.

pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak.[22]

Menurut Mockler pengawasan dalam konteks manajemen pada dasarnya merupakan upaya yang sistematis untuk menentukan standar kinerja (*performance standars*), merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan prestasi actual dengan standar yang ditentukan, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur besarnya, serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa seluruh sumberdaya organisasi digunakan dengan cara yang paling efektif dan efesien untuk mencapai tujuan organisasi. Dari pemahaman atas definisi tersebut terlihat secara jelas tujuan dari pengawasan dan hakekat pengawasan sebagai sebuah proses yang terdiri atas tahapan kegiatan yang saling terkait.[23]

Arum Novianita Witanti, Moch. Dzulkirom dan Topowijono dalam jurnalnya yang berjudul "Evaluasi Pengawasan Pemberian Kredit Modal Kerja Sebagai Upaya Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah Di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero), Tbk Cabang Pembantu Wates Kabupaten Kediri" menjelaskan Pengawasan Kredit merupakan fungsi manajemen untuk mengendalikan pengelolaan kekayaan perushaan dalam bentuk perkreditan yang lebih baik, guna untuk menghindari terjadinya permasalahan dengan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan perkreditan yang telah ditentukan (Muljono, 2001:460).[24]

Andri Yuni Astuti dalam jurnalnya yang berjudul **"Pinjaman Bergulir, Kredit Macet,** Serta **Efek Moderasi Pendampingan"** menjelaskan Kredit macet

IAIN PURWOKERTO

---

[22] Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 152.

[23] State Audit Reform-Sector Development Program, *Prosedur Kerja Audit Berdasarkan Standar Internasional*, (Jakarta: PT Nusa Consultant, 2007), hlm. 22.

[24] Arum Novianita Witanti, dkk, "Evaluasi Pengawasan Pemberian Kredit Modal Kerja Sebagai Upaya Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah Di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero), Tbk Cabang Pembantu Wates Kabupaten Kediri", (Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 40 No. 2, Universitas Brawijaya Malang, 2009), hlm. 117.

adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesenjangan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur (Siamat, 1993).[25]

Pada Jurnal Aset karya Achma Hendra Setiawan dan dan Tri Wahyu Rejekiningsih dengan judul **"Dampak Program Dana Bergulir Bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM)"** menjelaskan dana bergulir,Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 TentangPedoman Pengelolaan Dana Bergulir padaKementerian Negara/Lembaga, dana berguliradalah dana yang dialokasikan oleh KementerianNegara/Lembaga/Satuan Kerja Badan LayananUmum untuk kegiatan perkuatan modal usahabagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, danusaha lainnya yang berada di bawah pembinaanKementerian Negara/Lembaga. Program inimerupakan salah satu terobosan KementerianKUKM untuk membantu KUKM dalam rangkamendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui kebijakan pembinaan dan pengembanganprogram KUKM (Panggabean, 2005).[26]

Mengenai pembahasan tentang tema yang sama, ditemukan juga beberapa skripsi terdahulu yang memiliki tema serupa, diantaranya ada yang menulis skripsi mengenai "**Pelaksanaan Monitoring Pembiayaan Murabahah Warung Mikro Guna Meminimalisir Risiko"** karya Sri Luli Rizkiana, 2017. Beliau membahas tentang Prosedur pembiayaan yang merupakan gambaran sifat atau metode untuk melaksanakankegiatan pembiayaan.Seseorang yang berhubungan dengan pembiayaan harus menempuh prosedur pembiayaan yang sehat, meliputi prosedur persetujuan pembiayaan, prosedur administrasi dan prosedur pengawasan pembiayaan.Pengawasan pembiayaan (monitoring) memiliki tujuan untuk meminimalisir terjadinya kerugian yang dialami bank.Dengan pengawasan

IAIN PURWOKERTO

[25] Andri Yuni Astuti, "Pinjaman Bergulir, Kredit Macet, Serta Efek Moderasi Pendampingan", (Upajewa Dewantara, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, t.t), hlm.3.

[26] Achma Hendra Setiawan dan Tri Wahyu Rejekiningsih, "Dampak program Dana Bergulir Bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM)", (Aset, Vol. 11 No. 2, Universitas Diponegoro Semarang, 2009), hlm. 110.

atau monitoring yang dilakukan, maka bisa membuat bank syariah mempunyai kualitas yang baik, seperti Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kedoya yang mempunyai NPF 0%.Penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif. Informasi mengenai penelitian di dapat dari tehnik-tehnik pengumpulan data yang telah dilakukan terhadap subyek penelitian yaitu *Area Micro Banking Manager, Micro Banking Manager, Micro Admin, Mitra Micro, Micro Financing Analyst* dan *Micro Financing Sales*.[27]

Selanjutnya dari penelitian yang berjudul **"Pelaksanaan Monitoring Sebagai Upaya Preventive Terhadap Kolektabilitas Pembiayaan Murabahah di PT. BRI Syariah** Cabang **Pekanbaru".** Karya Ulifata Ni'mah, Penelitian ini di latar belakangi oleh maraknya aktivitas monitoring yang banyak di galakkan oleh instansi-instansi, baik instansi itu berupa perusahaan atau sebuah organisasi, program monitoring umumnya dijalankan untuk perbaikan sistem dan kinerja dalam rangka agar lebih mendisiplinkan karyawan/anggota/staff atau siapapun yang terlibat kedalam sebuah perusahaan atau organisasi tersebut. keingintahuan penulis terhadap pelaksanaan monitoring ini kemudian di kaitkan dengan penyebab tingkat kolektibilitas yang tinggi pada laporan akhir tahun di kebanyakan perbankan diIndonesia. Dalam hal ini, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah cabang kota Pekanbaru merupakan salah satu instansi yang menjalankan program Monitoring guna meminimalisir serta menangani tingkat kolektibilitas yang terjadi.[28]

Selanjutnya dari penelitian yang berjudul **"Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat"** karya Dahnil Sukarno Hatta, penelitian ini dilatar belakangi dengan

[27] Asari alauli Rizkiana, "Pelaksanaan Monitoring Pembiayaan Murabahah Warung Mikro Guna Meminimalisir Risiko di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kedoya", Skripsi, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017.

[28] Ulifata Ni'mah, "Pelaksanaan Monitoring Sebagai Upaya Preventative Terhadap Kolektabilitas Pembiayaan Murabahah Di PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru", Skripsi, Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2015.

IAIN PURWOKERTO

kesulitan LPDB-KUMKM dalam menyalurkan dana bergulir, karena keberadaanya yang masih baru dan harus menyesuaikan dengan peraturan yang sudah ada. Penelitian ini membahas tentang peran LPDB-KUMKM dalam mendistribusikan dana bergulir.Hasil dari analisa swot yang telah dilakukan pada penelitian ini, didapat koordinat posisi LPDB-KUMKM yaitu (0,46 ; 0,25), dan untuk itu posisi LPDB-KUMKM berada pada kuadran II, yaitu SRATEGI BERTUMBUH, pada area Rapid Growth.[29]

Selanjutnya skripsi dari Dita Wulandari dengan judul **"Monitoring dan Evaluasi Distribusi Zakat Pada Yatim Mandiri Yogyakarta"**, Skripsi, Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem monitoring dan evaluasi distribusi zakat di Yatim Mandiri Yogyakarta. Zakat memiliki potensi yang besar untuk dioptimalkan penyalurannya, penyaluran zakat saat ini tidak hanya secara konsumtif namun lebih kepada secara produktif. Dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian kualitatif, pengumpulan data dengan tehnik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan tujuan mendiskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan tentang penerapan sistem monitoring dan evaluasi distribusi zakat di Yatim Mandiri Yogyakarta. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan sistem monitoring dan evaluasi distribusi zakat di Yatim Mandiri Yogyakarta tidak membentuk tim secara khusus yaitu tim monev. Tanpa tim monev monitoring dan evaluasi dapat berjalan baik dengan adanya koordinasi dari setiap penangungjawab program namun tidak maksimal. Monitoring dilakukan dengan mengikuti program secara langsung dan dengan membuat laporan kegiatan program, sedangkan evaluasi program dilakukan setiap satu bulan sekali dan satu

IAIN PURWOKERTO

[29] Dahnil Soekarno Hatta, "Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat", Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

periode (1 tahun) dan dapat diperpanjang jika dari hasil evaluasi menunjukkan perkembangan yang positif. Evaluasi keberhasilan pelaksanaan program dapat dilihat dengan melihat ketercapaian target-target yang telah ditentukan.[30]

Skripsi yang berjudul **"Dampak Dana Bergulir Syariah (DBS) Pada Kinerja Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)"**Studi Kasus : BMT Penerima Dana Bergulir Syariah Kota Yogyakarta dari Husin Kusuma Wijaya, Program Studi Keuangan Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN SunanKalijaga, 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana bergulir syariah di BMT Kota Yogyakarta serta peran dana bergulir syariah dalam kinerja keuangan BMT penerima dana bergulir syariah Kota Yogyakarta. BMT yang ditunjuk merupakan rekomendasi dari Microfin sebagai pengawas yang ditunjuk oleh kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan pada BMT-BMT penerima dana bergulir syariah telah sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditentukan oleh Kementrian Koperasi dan UKM melalui pinjaman/pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah. Kemudian dana bergulir syariah telah berperan dalam rentabilitas BMT dan bertambahnya anggota BMT. Keuntungan yang dirasakan dapat diukur melalui kinerja keuangannya yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya.[31]

Skripsi dari Candri Maharani Puspitasari yang berjudul **"Studi Efektifitas Dana Bergulir Pada Usaha Mikro di Kota Kendari"**, SkripsiS1. Program Studi Ekonomi Pembangunan, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo. Dibimbing oleh Tajuddin dan NurAsizah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas program pengguliran dana PKBLD PT. Pos Indonesia pada usaha mikro yang menjadi mitra binaan PT. Pos Indonesia. Metode pengumpulan data dimulai dari observasi tempat penelitian, wawancara yang dilakukan terhadap pihak yang dianggap memiliki informasi

IAIN PURWOKERTO

[30] Dita Wulandari, "Monitoring dan Evaluasi Distribusi Zakat Pada Yatim Mandiri Yogyakarta" Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2015.

[31] Husin Kusuma Wijaya, "Dampak Dana Bergulir Syariah (DBS) Pada Kinerja Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)", Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

mengenai penelitian ini, kuesioner yang diberikan kepada pihak-pihak yang dianggap mengetahui tentang penelitian ini dan dokumentasi untuk memperoleh data dalam penelitian. Selanjutnya hasil penelitian dianalisis melalui metode deskriptif kuantitatif dan 3 komponen analisis yakni reduksi data,penyajian data hingga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menujukan bahwa penyaluran dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Daerah (PKBLD) PT. Pos Indonesia telah efektif berdasarkan pada indikator kualitas, kuantitas, dan pengembalian. Sedangkan indikator dampak masih kurang efektif dengan omset mengalami kenaikan 52,4 persen dan pendapatan mengalami kenaikan 50,46 perbulan.[32]

Skripsi dari Gde Dianta Yudi Pratama yang berjudul **"Penyelesaian Kredit Macet pada KSU.Tumbuh Kembang"**, Pemogan-Denpasar Selatan, skripsi ini membahas tentang Kredit macet yang sering terjadi dalam suatu perjanjian kredit. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya kredit macet serta upaya penyelesaian kredit macet yang terjadi pada KSU Tumbuh Kembang, Pemogan-Denpasar Selatan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode empiris yang menggunakan pendekatan dari aspek yang timbul dilapangan, yang memiliki sifat hukum yang nyata/sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dari penelitian ini dapat menghasilkan faktor eksternal yang menjadi penyebab kredit macet adalah debitur mengalami hambatan/kesulitan dalam kebutuhan ekonomi karena adanya suatu hal/ musibah sehingga menyebabkan terlambatnya pembayaran dalam melunasi angsuran. Sedangkan faktor internal adalah lemahnya informasi dan pengawasan dalam perputaran kredit sehingga menyebabkan pengawasan menjadi tidak maksimal. Dan upaya yang dilakukan

IAIN PURWOKERTO

[32] Candri Maharani Puspitasari, "Studi Efektifitas Dana Bergulir Pada Usaha Mikro di Kota Kendari", Skripsi, Kendari: Halu Oleo, Kendari, 2016.

dalam penyelesaian kredit macet di KSU. Tumbuh Kembang adalah melalui penyelesaian diluar pengadilan/non litigasi.[33]

Tabel 2
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis/Judul	Kelebihan	Kekurangan
1	Sri Luli Rizkiana Pelaksanaan Monitoring Pembiayaan Murabahah Warung Mikro Guna Meminimalisir Risiko	Membahas tentang prosedur pelaksanaan peminjaman dana serta pelaksanaan monitoring sebagai bentuk pengawasan atas dana yang dipinjamkan.	Studi kasus penelitian yang berbeda.
2	Ulifata Ni'mah Pelaksanaan Monitoring Sebagai Upaya Preventive Terhadap Kolektabilitas Pembiayaan Murabahah di PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru	Membahas pelaksanaan monitoring dalam rangka memperbaiki sistem dan kinerja	- Studi kasus yang berbeda - Pada penelitian ini tidak membahas tentang fungsi pelaksanaan monitoring dalam memotivasi para peminjam dana.
3	Dahnil Sukarno Hatta Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat	Membahas tentang peran dana bergulir bagi UKM	Fokus penelitian dan studi kasus yang berbeda.
4	Dita Wulandari Monitoring dan Evaluasi Distribusi Zakat Pada Yatim Mandiri Yogyakarta	Membahas pelaksanaan monitoring dan evaluasi.	Studi kasus yang berbeda dan penelitian ini tidak membahas mengenai bagaimana solusi

[33] Gde Dianta Yudi Pratama, "Penyelesaian Kredit Macet pada KSU.Tumbuh Kembang", Skripsi, Denpasar: Universitas Udayana Denpasar, 2015.

IAIN PURWOKERTO

			mengatasi kemacetan dalam pendistribusian dana
5	Husin Kusuma Wijaya Dampak Dana Bergulir Syariah (DBS) Pada Kinerja Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Studi Kasus : BMT Penerima Dana Bergulir Syariah Kota Yogyakarta	Membahas peran dana bergulir	Fokus penelitian serta studi kasus yang berbeda
6	Candri Maharani Puspitasari Studi Efektifitas Dana Bergulir Pada Usaha Mikro di Kota Kendari	Membahas dana bergulir bagi usaha mikro	- Fokus penelitian dan studi kasus yang berbeda - Pada penelitian ini tidak membahas mengenai bagaimana cara mengatasi kredit macet
7	Gde Dianta Yudi Pratama Penyelesaian Kredit Macet pada KSU.Tumbuh Kembang, Pemogan-Denpasar Selatan	Membahas apa yang menjadi faktor penyebab kredit macet	Fokus penelitian dan studi kaus yang berbeda

IAIN PURWOKERTO

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Monitoring

1. Pengertian Monitoring

George R.terry (1998) mengemukakan bahwa: "*control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed, to insure result in keeping with the plan*."

Henry fayol (1841-1925) mengatakan bahwa: "*control is consist in verifying whether everything occurs in conformity with the plan adopted, the instruction issued and principles established. It has for object to point out weaknesses and errors in order to reactivity them and prevent recurrence. It operates in everything peoples, actions*."

Stephen P. Robins &mary coulter (1999), merumuskan pengawasan sama dengan pengendalian sebagai proses-proses memantau kegiatan-kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan itu diselesaikan sebagaimana telah direncanakan dan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti.

James AF. Stoner & R. Edward freeman (1996), mengistilahkan pengawasan sama dengan pengendalian manajemen adalah proses yang memastikan bahwa aktivitas aktual sesuai dengan aktivitas yang direncanakan.[34]

Istilah lain dari pengawasan adalah pengendalian, pengendalian menurut Hansen dan Mowen adalah proses penetapan standar, dengan menerima umpan balik berupa kinerja sesungguhnya, dan mengambil

[34] Usman Efendi, *Asas Manajemen*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.206.

tindakan yang diperlukan jika kinerja sesungguhnya berbeda secara signifikan dengan apa yang telah direncanakan.[35]

Definisi Monitoring dalam 4 hal utama yaitu:

a. Ruang Lingkup : Berbagai ahli menggunakan istilah monitoring untuk menelusuri berbagai informasi yang berhubungan dengan penerapan standar pelayanan.
b. Sifat : Istilah monitoring digunakan untuk menggambarkan sebuah sistem rutin dari pengumpulan dan penganalisaan informasi mengenai berbagai kegiatan dalam penerapan standar pelayanan.
c. Waktu : Monitoring dilakukan secara reguler dan terus menerus sepanjang pelaksanaan penerapan standar pelayanan.
d. Tujuan : Tujuan monitoring biasanya cukup spesifik, biasanya terfokus pada masalah sejauhmana pelaksanaan standar pelayanan sesuai (*on the track*) dengan perencanaannya. Monitoring biasanya secara rutin mengukur dan membandingkan apa yang telah dilaksanakan dengan apa yang telah direncanakan.[36]

2. Fungsi dan Tujuan Monitoring

Hal penting lain setelah penyusunan laporan adalah pemanfaat laporan itu sendiri untuk perbaikan dan peningkatan berkelanjutan. Banyak sudah ditemukan kasus dimana laporan hasil monitoring tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan bahkan ada yang tersia-siakan sama sekali. Mengingat biaya untuk melaksanakan monitoring biasanya cukup besar, maka perlu dipertimbangkan berbagai metode yang memungkinkan banyak pihak dapat mengakses laporan hasil evaluasi dan juga pada saat yang sama menjaga kerahasiaan narasumber dan informasi tertentu yang mungkin diperuntukan untuk konsumsi pihak tertentu.

IAIN PURWOKERTO

[35] Abdul Halim, Achmad Tjahjono dan Muh. Fakhri Husein, *Sistem Pengendalian Manajemen*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2003), hlm. 4.

[36] Lembaga Administrasi Negara, *Monitoring dan Evaluasi*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2005), hlm. 7-8.

Jika informasi yang disampaikan dalam laporan hasil evaluasi tidak memberikan kerugian/keuntungan apapun terhadap pihak-pihak manapun, maka laporan hasil evaluasi ini bisa ditempatkan pada akses seluas mungkin, misalnya di Perpustakaan ataupun di Website instansi sehingga dapat diakses oleh berbgai kalangan.Namun biasanaya untuk hasil evaluasi penerapan standar pelayanan, informasi yang disampaikan dapat di akses oleh berbagai kalangan.

Cakupan fungsi pengawasan, yaitu:

a. Mengawasi apakah pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan kredit, proses pemberian kredit dan ketentuan internal bank yang berlaku.
b. Mengawasi penilaian kolektabilitas kredit apakah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator.
c. Memantau kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit.[37]

Monitoring digunakan untuk menilai pelaksanaan penerapan secara rutin untuk mengumpulkan data yang diperlukan agar pelaksanaan penerapan standar pelayanan tetap berada dalam kerangkayang diinginkan (*on track progress assessment*).[38]

Ada dua bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak perbankan dalam bidang pengawasan kredit yaitu,

a. Pengawasan dengan model *preventive control*

Pengawasan dengan model ini adalah dilakukan oleh pihak perbankan sebelum kredit tersebut dicairkan atau di berikan kepada calon debitur.Tujuannya adalah guna menghindari kesalahan yang lebih fatal kemudian hari. Jadi di sini akan dilihat mulai dari kelengkapan berkas

IAIN PURWOKERTO

[37] Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 44.

[38] Lembaga Administrasi Negara, *Monitoring dan Evaluasi*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2005), hlm. 13.

yang diajukan hingga survei ke lapangan seperti jaminan dan bentuk usaha yang akan dilakukan.

b. Pengawasan dengan model *represif control*

Pengawasan dengn model ini adalah dilakukan pada saat kredit tersebut telah diberikan kepada debitur.Pengawasan disini diberikan dengan tujuan agar kreditur tersebut terbangun kedisiplinan yang kuat untuk melunasi setiap pinjamannya secara tepat waktu.[39]

3. Metode-metode Monitoring

Monitoring dapat dilakukan melalui beberapa metode, yaitu sebagai berikut:

a. *On Desk Monitoring*

Proses monitoring kredit dilakukan ditempat kerja dengan mereview data berikut:

1) Anggaran perusahaan
2) Rencana kerja perusahaan
3) Neraca
4) Laporan penggunaan dana
5) Laporan perkembangan nasabah
6) Laporan kegiatan produksi / pembelian / penjualan / persediaan / piutang, dan sebagainya
7) Dokumen pengikatan agunan
8) Penggunaan fasilitas kredit
9) Limit dan baki debit fasilitas kredit
10) Jenis dan jangka waktu kredit
11) Syarat-syarat / *covenant credit*

IAIN PURWOKERTO

[39] Irham Fahmi, *Manajemen Keuangan Perusahaan dan Pasar Modal*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm. 146.

12) Kualitas kredit / kolektabilitas kredit[40]

b. *On Site Monitoring*

Proses monitoring dilakukan dengan kunjungan langsung kelokasi usaha debitur.Hal ini dilakukan untuk memastikan kondisi usaha debitur secara langsung. Kunjungan khusus dapat juga dilakukan dalam hal terdapat penyimpangan atas kesepakatan kredit. Proses ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara hasil *on desk monitoring* dengan kondisi fisik dilapangan.[41]

c. *Annual Review*

Review tahunan dilakukan terhadap seluruh fasilitas kredit debitur yang akan jatuh tempo, bank meminta kembali dokumen-dokumen terbaru dari debitur dan melakukan kembali analisis kredit, apakah kredit dapat diperpanjang atau harus dilunasi atau diperlukan restrukturisasi. Hasil analisis kredit dituangkan dalam proposal kredit untuk diajukan kembali kepada Komite kredit untuk mendapat persetujuan.[42]

Monitoring dapat menggunakan berbagai metode pengumpulan data.Ada metode pengumpulan data primer dan skunder.Metode primer biasanya meliputi kuesioner, survey, *focus group discussions* (FGD), observasi langsung dan wawancara dengan narasumber kunci/utama. Metode pengumpulan data sekunder biasanya meliputi studi kepustakaan dan review terhadap berbagai hal yang sejenis yang pernah dilakukan oleh pihak-pihak lain dan dokumen-dokumen yang terkait. Monitoring yang berkualitas biasanya mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber dan metode

IAIN PURWOKERTO

[40] Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 81-82.

[41] *Ibid*…, hlm. 82.

[42] *Ibid*…, hlm. 82-83.

yang berbeda sehingga dapat dilakukan cek silang validitasnya.Hal ini biasa disebut sebagai *Triangulation* (triangulasi).[43]

Untuk melihat sejauhmana standar pelayanan yang baru mampu meningkatkan kinerja individual para pelaksana, kinerja unit kerja dan organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, monitoring harus disertai sistem pengukuran kinerja yang jelas, maka dapat ditentukan metode-metode monitoring sebagai berikut:

a. Observasi Supervisor

   Metode ini menggunakan supervisor disetiap unit kerja sebagai observer yang memantau jalannya penerapan standar pelayanan.

b. Interview dengan pelaksana

   Selain dilakukan observasi oleh para supervisor, monitoring dapat dilakukan melalui wawancara dengan para pelaksana. Interview dapat dilakukan oleh tim monitoring yang telah dibentuk sebelumnya.

c. Interview dengan pelanggan/anggota masyarakat

   Informasi dari pihak luar organisasi, terutama para pelanggan atau masyarakat, juga sangat bermanfaat sebagai bahan masukan monitoring. Informasi yang diperoleh dari sisi pelanggan berkaitan dengan sisi kualitas pelayanan yang diberikan. Pelayanan berkaitan erat dengan prosedur-prosedur yang dilaksanakan organisasi. Jika prosedur yang dilaksanakan dengan baik, maka pemberian pelayanan dapat dilakukan dengan baik pula.

d. Pertemuan dan diskusi kelompok kerja

   Pertemuan-pertemuan dengan kelompok kerja dengan setiap unit kerja akan menjadi sarana yang efektif dalam melakukan monitoring. Pertemuan dapat dirancang secara periodik, bahkan untuk hal-hal yang perlu dipecahkan secara cepat, dapat dilakukan pertemuan mendadak.

---

[43] Lembaga Administrasi Negara, *Monitoring dan Evaluasi*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2005), hlm. 12.

IAIN PURWOKERTO

e. Pengarahan dalam pelaksanaan

Monitoring juga dapat dilakukan melalui pengarahan-pengarahan dalam pelaksanaan, untuk menjamin agar proses berjalan sesuai dengan prosedur, waktu dan biaya yang telah dibakukan.[44]

B. Peminjaman Dana Bergulir

1. Pengertian Peminjaman Dana Bergulir

Dana bergulir adalah dana yang bersumber dari APBD yang dipinjamkan kepada koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah sebagai bagian dari peran fasilitas pemerintah daerah dalam mengembangkan koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, untuk dibayarkan kembali kepada pemerintah daerah dalam waktu yang telah ditentukan. Dana bergulir, selain bersumber dari APBD juga berasal dari laba dari pinjaman bergulir itu sendiri. Jadi laba yang diperoleh kemudian digulirkan kembali kemasyarakat.

Pinjaman bergulir adalah pinjaman yang dananya bersumber dari APBD yang dikelola dan diperuntukan secara khusus, dalam jangka waktu tertentu dimana uang pengembalian angsuran yang terkumpul dapat disalurkan kembali.[45]

Dana bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga. (Keuangan, 2008).[46]

2. Landasan Hukum Peminjaman Dana Bergulir

---

[44] Lembaga Administrasi Negara, *Monitoring dan Evaluasi*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2005), hlm. 47-48.

[45] Dikutip dari PeraturanDaerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas, Bab I, Pasal 1, Nomor 5.

[46] Chintya Fibri Asmara, "Implementasi Bantuan Dana Bergulir Bagi Pelaku Usaha", (Naskah Publikasi, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2018), hlm. 3.

IAIN PURWOKERTO

Landasan Hukum Peminjaman Dana Bergulir berdasarkan pada:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas.
b. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir.[47]

3. Syarat Peminjaman Dana Bergulir

Persyaratan permohonan dana pinjaman bergulir mengajukan permohonan tertulis dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut:

a. Pelaku UMKM;
b. Mempunyai Kelompok UMKM dengan jumlah anggota minimal 10 (sepuluh) orang Pelaku UMKM.
c. Kelompok mengajukan permohonan secara tertulis dengan dilampiri syarat – syarat:
   1) Mengisi formulir yang telah disediakan;
   2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk suami / istri;
   3) Fotocopy Kartu Keluarga;
   4) Surat Pernyataan bertempat tinggal di rumah sendiri/ orang tua/ bukan rumah kontrak;
   5) Bukti kepemilikan barang jaminan, khusus bagi pemohon pelaku Usaha Kecil; dan
   6) Surat Kuasa menjual barang jaminan, khusus bagi pemohon pelaku Usaha Kecil.
d. Besar pinjaman maksimal Rp 5.000.000,- per anggota Kelompok.
e. Bagi Usaha Mikro, Jasa sebesar 2% per Tahun dari pokok pinjaman.
f. Bagi Usaha Kecil, Jasa sebesar 7% per Tahun dari pokok pinjaman.[48]

IAIN PURWOKERTO

[47]Dokumen Bidang UKM (Blangko Permohonan Dana Bergulir)
[48] Dokumen Bidang UKM (Blangko Permohonan Dana Bergulir)

C. Kredit Macet

1. Pengertian Kredit Macet

Kata kredit berasal dari bahasa Yunani "*Credere*" yang berarti kepercayaan atau berasal dari bahasa Latin "*Creditum*" yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Selanjutnya pengertian kredit tersebut disempurnakan lagi dalam *No. 7 Tahun 1998,* yang mendefinisikan pengertian kredit adalah sebagai berikut:

> *"kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga".*[49]

> *Menurut Undang-undang pengembalian pinjaman bergulir diklasifikasikan macet, yaitu apabila tidak membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sebanyak lebih dari 9 (Sembilan) kali secara berturut-turut, tetapi belum melampui12 (duabelas) kali tidak membayar angsuran secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.*[50]

Bank Indonesia yang juga disebut sebagai *the last of resort* dalam surat keputusan Direksi Bank Indonesia No 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif Pasal 6 ayat 1 membagi tingkat kollektabilitas kredit kedalam 5 jenis, yaitu:

a. Kredit lancar
b. Kredit dalam perhatian khusus
c. Kredit kurang lancar
d. Kredit keraguan, dan
e. Kredit macet[51]

IAIN PURWOKERTO

---

[49] Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN, 2003), hlm.11.

[50] Dikutip dari PeraturanDaerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas, Bab IV, Pasal 14.

[51] Irham Fahmi, *Manajemen Keuangan Perusahaan dan Pasar Modal*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm. 116.

2. Faktor-faktor penyebab kredit bermasalah

Kredit bermasalah dapat disebabkan oleh satu atau beberapa faktor yang harus dikenali secara dini oleh pejabat kredit karena adanya unsur kelemahan baik dari sisi debitur, sisi bank maupun ekstern debitur dan bank. Dari sisi debitur kelemahan disebabkan antara lain masalah operasional usaha, manajemen, kecurangan dan atau ketidak-jujuran debitur dalam mengelola kredit, pemutusan hubungan kerja, dan sebagainya. Dari sisi bank kelemahan disebabkan antara lain itikad tidak baik dan atau kekurangmampuan dari pejabat/pegawai bank, kelemahan sejak awal dalam proses pemberian kredit, kelemahan pembinaan dan pengawasan kredit dan sebagainya. Dari sisi ekstern debitur dan bank kelemahan disebabkan oleh *force majeure*, perubahan-perubahan lingkungan eksternal, perubahan peraturan pemerintah dan sebagainya.[52]

Dimasa depan kondisi penuh ketidakpastian. Karenanya setiap kredit yang dibiayai pasti memiliki risiko tidak tertagih alias macet. Hal ini disebabkan oleh berbagai sebab, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sengaja, artinya nasabah sengaja untuk tidak mau membayar kreditnya. Sementara itu tidak disengaja artinya, nasabah memang tidak bermaksud untuk tindak mengembalikan kreditnya. Hanya saja nasabah belum memiliki kemampuan misalnya akibat kerugian yang diderita atau terkena bencana.[53]

Kegagalan dalam suatu transaksi pemberian kredit dapat disebabkan oleh berbagai macam kejadian, antara lain:

IAIN PURWOKERTO

[52] Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN, 2003), hlm. 268.

[53] Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: PRENADAMEDIA, 2010), hlm. 246.

a. *Self-dealing* (aktifitas yang dilaksanakan untuk kepentingan diri sendiri), yaitu adanya keterlibatan pegawai bank dalam kegiatan usaha nasabah karena adanya kepentingan pribadi atas pemberian kredit tersebut.
b. *Anxiety for income* (haus akan laba), namun kurang mengupayakan sumber pengembalian, yaitu arus kas.
c. Kompromi terhadap prinsip pemberian kredit yang sehat.
d. Tidak tersedia kebijakan dan prosedur perkreditan yang memenuhi syarat suatu proses pengelolaan kredit yang baik.
e. Informasi kredit untuk pengambilan keputusan tidak lengkap.
f. Lambat dalam mengambil tindakan likuidasi sesuai perjanjian.
g. Menggampangkan permasalahan yang terjadi.
h. Tidak terdapat pengawasan kredit yang konsisten.
i. Kurang memiliki kemampuan teknis.
j. Ketidakmampuan melakukan seleksi atas risiko.
k. Pemberian kredit yang melampaui batas.
l. Tekanan persaingan usaha.[54]

3. Cara Mengatasi Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Kredit bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan kredit yang digolongkan kedalam kolektibilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M).[55]

Cara mengatasi kredit bermasalah yaitu dengan mengetahui faktor-faktor penyebab kredit menjadi bermasalah, kemudian bank harus mempunyai sistem pengenalan secara dini kredit bermasalah, selanjutnya pengeloalaan

[54] Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 96-97.

[55] Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN, 2003), hlm. 252.

IAIN PURWOKERTO

kredit bermasalah dapat dilakukan dengancara penetapan strategi pengelolaan kredit bermasalah dan rencana tindak lanjut atas kredit-kredit ynag menjadi bermasalah tersebut. Penetapan strategi pengelolaan kredit bermasalah dilakukan setelah melalui proses analisa dan evaluasi yang meliputi kelengkapan dokumen, riwayat hubungan bank dengan debitur, investigasi untuk mengetahui keadaan/ kondisi debitur saat ini. Berdasarkan langkah tersebut dapat diketahui posisi bank terhadap debitur, sehingga dapat ditetapkan alternatif penyelesaian kredit bermasalah. Pemilihan dan penetapan strategi kahir didasarkan pada hasil negosiasi dengan debitur. Alternative pilihan yang dapat dilakukan dalam upaya menyelesaikan kredit bermasalah antara lain: pengawasan, restrukturisasi, dan penyelesaian kredit.[56]

Penanganan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berbagai pilihan seperti:

a. Rescheduling

Suatu tindakan untuk memperpanjang jadwal cicilan pokok kredit. Penjadwalan kembali dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran kredit.

b. Reconditioning

Reconditioning merupakan metode penyehatan kredit, yaitu bank melakukan perubahan beberapa persyaratan yang berlaku seperti tercantum pada perjanjian kredit seperti:

1) Kapitalisasi bunga, yaitu kewajiban dan tunggakan bunga dijadikan utang pokok.
2) Penundaan pembayaran bunga sampai jangka waktu tertentu.
3) Penurunan suku bunga kredit.
4) Pembebasan tunggakan bunga dsb.

[56] Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN, 2003), hlm. 115.

IAIN PURWOKERTO

c. *Restructuring*

Merupakan tindakan bank kepada nasabah, anatara lain dengan cara memberikan kredit tanbahan pada nasabah, dengan pertimbangan misalnya nasabah memang membutuhkan tambahan dana agar dapat mengatasi permasalahan, dan usaha yang dibiayai masih dinilai layak untuk dilanjutkan.

d. *Kombinasi*

Merupakan *kombinasi* dari upaya *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.

e. *Likuidasi* Jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai iktikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua kewajibannya.[57]

D. Landasan Teologis

فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَٱدْفَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

"*…kemudian apabila menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas akan segala yang kamu lakukan*" (QS.An Nisa (4):6).

يَعْلَمُ خَآئِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى ٱلصُّدُورُ ﴿١٩﴾

"*Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati*" (QS. Al Mu'min (40): 19).[58]

---

[57] Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 98.

[58] Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm. 158.

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak.[59] Filosofi pengawasan dalam Islam adalah koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh seseorang dengan sangat persuasif dan edukatif. Koreksi yang persuasif dan edukatif ini dapat dilakukan dalam tiga rangkaian meliputi satu paket yaitu: *tawa shaubil haqqi*, *tawa shaubis shabri*, dan *tawa shaubil marhamah*.

1. *Tawa shaubil haqqi*, saling menasehati atas dasar kebenaran sebagaimana firman Allah:

   إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ

   "*kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan nasehat-menasehati supaya mentaati kebenaran…"(QS. Al-Ashr:3).*

2. *Tawa shaubis shabri*, saling menasehati atas dasar kesabaran sebagaimana firman Allah:

   وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ

   "…dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran."(QS. Al-Ashr; 3)

3. *Tawa shaubil marhamah*, sling menasehati atas dasar kasih sayang sebagaimana firman Allah:

   ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡمَرۡحَمَةِ ١٧

   "Dan Dia (tidak pula) Termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang." (Qs. AL-Balad:17).

Berkaca pada sejarah hidup, Rasulullah saw. melakukan pengawasan yang benar-banar menyatu dalam kehidupan. Jika ada seseorang yang melakukan

IAIN PURWOKERTO

[59] M. Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Bisnis syariah*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm. 152.

kesalahan, maka pada saat itu juga Rasulullah saw. menegurnya, sehingga tidak ada kesalahan yang didiamkan oleh Rasulullah saw. saat itu. Rasulullah saw. pernah melihat orang yang wudhunya kurang baik, ia langsung ditegur saat itu juga. Ketika ada seorang sahabat yang shalatnya kurang baik, Rasulullah saw. mengatakan, "*Shalatlah Anda karena sesungguhnya Anda adalah orang yang belum melakukan shalat*".[60]

IAIN PURWOKERTO

[60] Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 159.

BAB III
METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan suatu sistematika, metodologi ilmiah dengan tujuan untuk memperoleh sesuatu yang baru atau asli dalam usaha memecahkan suatu masalah yang setiap saat dapat timbul di masyarakat. Kebaruan atau keaslian dapat dipandang dari hasil yang diperoleh, bahan atau materi yang dipergunakan, cara atau alat yang dipergunakan, satu dengan yang lain dapat berkaitan.[61]

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan adalah Penelitian Lapangan (*field research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Penelitian ini berangkat dari lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.[62]Penelitian ini digolongkan dalam penelitian deskriptif-kualitatif, yaitu metode penelitian untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi obyek penelitian dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.[63]Dalam penelitian ini, penulis secara langsung melakukan observasi penelitian ke Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kabupaten Banyumas.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian ini bertempat di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas, yang beralamat dijalan

[61] Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2012), hlm. 111.

[62] Tim Penyusun, Panduan Penulisan Skripsi STAIN Purwokerto, (Purwokerto: STAIN Press, 2012), hlm. 8.

[63] Sri Luli Rizkiana, "Pelaksanaan Monitoring Pembiayaan Murabahah Warung Mikro Guna Meminimalisir Risiko di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kedoya", Skripsi, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017.

Mohammad besar nomor 2 Purwokerto, Banyumas Jawa Tengah, waktu pelaksanaanya yaitu mulai 06 April 2018 s/d 07 Desember 2018.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

   Yang dimaksud subjek penelitian adalah benda, orang, atau tempat untuk mendapatkan data terhadap variabel yang dipermasalahkan. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah Kepala bidang UKM dan para karyawan bidang UKM Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kabupaten Banyumas.

2. Objek Penelitian

   Sedangkan objek penelitian merupakan variabel yang penting dalam penelitian ini. Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah pelaksanaan monitoring pada peminjaman dana bergulir dalam mengatasi kredit macet di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kabupaten Banyumas.

D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (1984:47) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah *kata-kata*, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.[64]

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik individu seperti hasil dari wawancara maupun pengisian kuesioner yang dilakukan peneliti.[65]

   Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah kepala bidang UKM dan para

IAIN PURWOKERTO

[64] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 157.

[65] Nurmi Yulis, "Pemanfaatan Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar", (Jom FISIP Vol. 4 No. 1, Pekanbaru, 2017), hlm. 9.

karyawan bidang UKM Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kabupaten Banyumas.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data primer yang diolah lebih lanjut dan telah disajikan oleh pihak lain.[66]

Sumber Sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang ketiga atau lewat dokumen.Dalam hal ini penulis mengambil data dari dokumen-dokumen Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas seperti brosure, laporan tahunan dll.

E. Teknik Pengumpulan Data

Ada sejumlah pengumpulan data yang dapat digunakan.Akan tetapi, tidak semua metode cocok untuk semua jenis data.Oleh karena itu, peneliti harus memilih metode mana yang paling tepat.[67]Teknik Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.[68]

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sesuatu objek dengan sistematika fenomena yang diselidiki.Observasi dapat dilakukan sesaat maupun ataupun mungkin dapat diulang.[69]Dalam observasi penelitian dilakukan dengan mendatangi secara langsung Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas, yang beralamatkan di jalan Mohammad besar nomor 2 Purwokerto.

IAIN PURWOKERTO

---

[66] Nurmi Yulis, "Pemanfaatan Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar", (Jom FISIP Vol. 4 No. 1, Pekanbaru, 2017), hlm. 9.

[67]Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 268

[68] Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*…, hlm. 57.

[69] Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2012), hlm. 69

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[70]

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu staf bidang UKM Bapak Indra sebagai penanggung jawab serta pelaku monitoring bagi peminjam dana bergulir di Kabupaten Banyumas.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan observasi. Dokumentasi yang dimaksudkan berbentuk surat-surat, gambar/foto atau catatan-catatan lain yang berhubungan dengan fokus penelitian. Teknik dokumentasi didapatkan dari sumber non manusia, artinya sumber ini terdiri dari rekaman dan dokumen.[71]

Pada penelitian ini, teknik dokumentasi dilakukan oleh peneliti dengan melakukan observasi data-data pendukung yang ada di bidang UKM Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kabupaten Banyumas seperti daftar hadir, pelaku UKM yang meminjam dana bergulir, dan informasi-informasi lain yang diharapkan dapat menggambarkan secara detail mengenai focus penelitian.

IAIN PURWOKERTO

F. Teknis Analisis Data

Metode analisis data yang peneliti gunakan adalah metode analisis data kualitatif, menurut Kirk dan Miller (1986:9) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada mausia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. [72] Istilah penelitian kualitatif

[70] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 186.
[71] Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*..., hlm. 185.
[72] *Ibid*…, hlm. 4.

merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.[73]

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dan di interpretasikan (Masri S. Dan Sofian E.). Ini dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif, denganmenggunakan tabel-tabel, grafik, ataupun perhitungan angka-angka (*numerical analysis*). Jadi data yang bersifat menyeluruh diuraikan atau dipecah-pecah menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil (Supranto).[74]

Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction, data display, conclusion drawing/verification*.[75]

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

   Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

   Inti dari kata reduksi adalah proses penggambungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (*script*) yang akan dianalisis. Hasil dari wawancara, hasil observasi dan atau hasil dari studi dokumentasi diubah menjadi bentuk tulisan (*script*) sesuai dengan formatnya masing-masing.

   Dalam hal ini data yang diperoleh oleh penulis mengenai Pelaksanaan Monitoring Peminjaman Dana Bergulir Dalam Mengtasi Kredit Macet, penulis memilih dan memisahkan hal-hal yang diperlukan

[73] Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 4.

[74] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 90.

[75] *Ibid* …, hlm. 337.

dalam penelitian dan membuang yang sekiranya tidak dibutuhkan dalam penelitian yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian Data Dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagian, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sebagainya. Dengan mendispaly data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam melakukan display data, selain dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja), dan *chart*.[76]

Dalam hal ini teknik penyajian data digunakan untuk mengumpulkan informasi yang tersusun pada penelitian Pelaksanaan Monitoring Pada Peminjaman Dana Bergulir Dalam Mengatasi Kredit Macet di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas.

3. *Conclusion Drawing* (Verifikasi Data)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal atau yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan pada tahap awal didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan dan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.[77]

G. Uji Keabsahan Data

Peneliti harus menguji keabsahan data agar memperoleh data yang valid.Untuk menetapkan keabsahan data tersebut diperlukan teknik pemeriksaan.Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi. Menurut Lexy J. Moleong, triangulasi adalah teknik

[76] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 341.

[77] *Ibid*…, hlm. 345.

IAIN PURWOKERTO

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.[78]Tringulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.[79]Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

Dengan teknik triangulasi dengan sumber, peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informasi penelitian sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan. Dalam menguji keabsahan data yang diperoleh, maka peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang UKM, Kasi Pengembangan UKM, Kasi Pemberdayaan, Perlindungan dan Pengawasan UKM, Kasi Fasilitasi dan Pembiayaan UKM, serta staf bidang UKM Bapak Indra Basuki selaku penanggung jawab pelaksanaan monitoring, selain itu peneliti juga melakukan derajat kepercayaan melalui teknik triangulasi dengan metode, yaitu melakukan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber dengan metode yang sama.

IAIN PURWOKERTO

[78] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm.330.

[79] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 125.

BAB IV
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas

1. Sejarah Singkat Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas yang beralamat di Jalan Muhammad Besar Nomor 2 Purwokerto sebagai perangkat Daerah merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas

Rencana strategis Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah dokumen teknis operasional yang merupakan pedoman dan penyusunan program kerja tahunan dan penyusunan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu 2013-2016.

IAIN PURWOKERTO

Sedangkan fungsinya adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan kerja.Agar pembangunan terarah dan berkesinambungan maka perlu adanya perencanaan strategi yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan program kerja.[80]

2. Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM

Adapun Visi Misi dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Banyumas adalah sebagai berikut:[81]

[80] Renstra Dinnakerkop UKM Banyumas, hlm. 1.
[81] *Ibid*...,hlm. 21.

VISI:

"Mewujudkan kesejahteraan masyarakat menjadi satuan organisasi teknis yang mampu mendukung setiap kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Tenaga Kerja, Bidang Koperasi, dan UKM serta bidang Transmigrasi yang maju dan berdaya saing".

MISI:

a. Optimalisasi pelayanan perluasan dan penempatan tenaga kerja serta transmigrasi
b. Optimalisasi pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan serta pengembangan hubungan industrial.
c. Membina dan memberdayakan lembaga ketrampilan dalam menyiapkan tenaga kerja.
d. Memberdayakan koperasi dan UKM melalui peningkatan kelembagaan, pembinaan, pengembangan, fasilitasi pembiayaan dan kemitraan.

3. Bidang UKM

Adapun kondisi UKM kabupaten Banyumas sebagi berikut :

a. Pengembangan UKM yang Berdaya Saing

Pengembangan yang diharapkan akan mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan penyedia lapangan kerja

b. Pengembangan Pasar dan Pengendalian Pedagang Kaki Lima

Pengembangan pasar dan pengemdalian PKL merupakan suatu cara mengembangkan kelompok pelaku usaha dengan karakteristik berpenghasilan rendah, bergerah disektor formal dan informasi terutama disektor perdagangan di pasar dan pedagang kaki lima.

c. Pengembangan kelembagaan Usaha Kecil Menengah

Pengembangan kelembagaan UKM merupakan salah satu wahana untuk mewujudkan adanya demokrasi ekonomi.Strategi ini bertujuan mewujudkan koperasi dan manajemen UKM yang berkualitas.

IAIN PURWOKERTO

d. Pengembangan dukungan terhadap investor

Pengembangan sistem pendukung terhadap kemudahan investasi merupaka salah satu wahana untuk meningkatkan produktivitas daya saing dankemandirian pembangunan daerah.

4. Struktur Organisasi Bidang UKM

Struktur Organisasi Bidang UKM Banyumas

Kepala Bidang UKM	: Rozani Umdati, SH.
Kasi Pengembangan UKM	: Dra. Pindah Listiyani
Kasi Perlindungan UKM	: Tri Kanti Handayani, SH
Kasi Fasilitasi & Pembiayaan UKM	: Tri Baskoro Wahyu Hidayat, SE
Analis Dunia Usaha	: Indra Basuki, SH
Pengadministrasian Umum	: Wartini
Pengadministrasian Umum	: Tugiyah
Staf	: Catur May Saputri
	Ragda Habib Albarnaba
	Nur Diana Fatmawati
	Nicka Nizar

5. Fungsi dan Tugas

a. Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah

1) Mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan kegiatan pembinaan, pemberdayaan, perlindungan, pengawasan serta fasilitasi dan pembiyaan usahakecil dan menengah.
2) Mengkoordinasikan penyiapan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan pembinaan, pemberdayaan, perlindungan, pengawasan serta fasilitasi dan pembiayaan usaha kecil dan menengah.
3) Mengkoordinasikan penyiapan kegiatan pembinaan, pemberdayaan, perlindungan, pengawasan dan usaha serta fasilitasi dan pembiayaan usaha kecil dan menengah

IAIN PURWOKERTO

4) Mengkoordinasikan penyiapan pembinaan bagi petugas pembinaan, pemberdayaan, perlindungan, pengawasan serta fasilitasi dan pembiayaan usaha kecil dan menengah.
5) Mengkoordinasikan penyiapan pengawasan kegiatan pembinaan, pemberdayaan, perlindungan, pengawasan serta fasilitasi dan pembiayaan usaha kecil dan menengah
6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Kepala Seksi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah

1) Menyiapkan perumusan kebijakan teknis kegiatan pembinaan, pengembangan usaha kecil dan menengah .
2) Menyiapkan penyelenggaraan pembinaan, pengembangan usaha kecil dan menengah.
3) Menyiapkan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengembangan usaha kecil dan menengah.
4) Menyiapkan pembinaan bagi petugas pembinaan, pengembangan usaha kecil dan menengah.
5) Menyiapkan pengawasan kegiatan pembianaan, pengembangan, usaha kecil dan menengah.
6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

IAIN PURWOKERTO

c. Kepala Seksi Pemberdayaan, Pengawasan Usaha Kecil dan Menengah

1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemberdayaan, perlindungan, pengawasan usaha kecil dan menengah.
2) Menyiapkan penyelenggaraan pemberdayaan, perlindungan, pengawasan usaha kecil dan menengah.
3) Menyiapkan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, perlindungan, pengawasan usaha kecil dan menengah.

4) Menyiapkan pembinaan bagi petugas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, perlindungan, pengawasan usaha kecil dan menengah.
5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Kepala Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah

1) Menyiapkan perumusan kebijakan teknis fasilitasi dan pembiayaan usaha kecil dan menengah.
2) Menyiapkan penyelenggaraan fasilitasi dan pembiayaan usaha kecil dan menengah.
3) Menyiapkan evaluasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan pembiayaan usaha kecil dan menengah.
4) Menyiapkan pembinaan bagi petugas pelaksana kegiatan fasilitasi dan pembiayaan usaha kecil dan menengah.
5) Menyiapkan pengawasan kegiatan fasilitasi dan pembiayaan usaha kecil dan menengah.
6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

e. Analis Dunia Usaha

1) Menganalisa dunia pelaku usaha mikro kecil dan menengah Kabupaten Banyumas
2) Mengumpulkan data-data usaha mikro kecil dan menengah Kabupaten Banyumas
3) Menganalisa perkembangan pelaku usaha mikro kecil dan menengah Kabupaten Banyumas

f. Pengadministrasian Umum

Mengadministrasikan dan mengagendakan kegiatan-kegiatan bidang usaha mikro kecil dan menengah

IAIN PURWOKERTO

g. Staf

Membantu semua pelaksanaan kegiatan bidang usaha mikro kecil dan menengah.

B. Prosedur Peminjaman Dana Bergulir

Dengan memperhatikan jumlah UKM di Kabupaten Banyumas yang menurut data Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kabupaten Banyumas tahun 2017 terdapat sekitar 66533 badan usaha. Sehingga UKM memiliki potensi sebagai tempat untuk penyaluran kredit.Usaha kecil dan mikro biasanya dikelola oleh pemilik modal usaha itu sendiri dan berbentuk bisnis keluarga.Oleh karenaitu biasanya kesuksesan usaha serupa ini sangat bergantung kepada kapabilitas kewirausahaan dan manejerial pemiliknya.Biasanya usaha kecil dan mikro secara umum lemah dalam hal mentalitas, edukasi, motivasi dalam mengekplorasi peluang, akses ke teknologi, sumber modal, kurangnya kemampuan teknismanajerial dan pemasaran.Oleh karenanya pemerintah memberikan perhatian kepada usaha kecil dan mikro.[82] Terutama kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah Kabupaten Banyumas pemerintah meluncurkan pembiayaan bagi usaha kecil mikro dan menengah berupa peminjaman dana bergulir.

Pinjaman bergulir adalah pinjaman yang dananya bersumber dari APBD yang dikelola dan di peruntukan secara khusus, dalam jangka waktu tertentu dimanauang pengembalian angsuran yang terkumpul dapat disalurkan kembali, bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan usaha mikro dan usaha di Daerah serta meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro dan usaha kecil, menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan menekan angka kemiskinan di Daerah. Dalam hal program penyaluran dana pinjaman bergulir tidak diperlukan lagi oleh masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menarik kembali semua dana pinjaman bergulir yang dikelola oleh masyarakat dengan persetujuan DPRD.

[82]Wawan Dhewanto dkk, *Manajemen Inovasi untuk Usaha Kecil dan Mikro*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 20.

IAIN PURWOKERTO

Pengelolaan pinjaman bergulir dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi tugas pengelolaan keuangan daerah. Penyaluaran dana pinjaman bergulir dilaksanakan bekerjasama dengan Bank Pemerintah dan/ atau lembaga keuangan Badan Usaha Milik Daerah yang ditunjuk sebagai lembaga penyalur pinjaman dan penenrima angsuran dengan membuka rekening khusus untuk pengelolaan dana pinjaman bergulir. Dana pinjaman bergulir bagi pemohon usaha mikro diberikan dengan prosedur mudah dan tanpa jaminan maupun dengan jaminan.

Gambar 1

Proses Peminjaman Dana Bergulir Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas

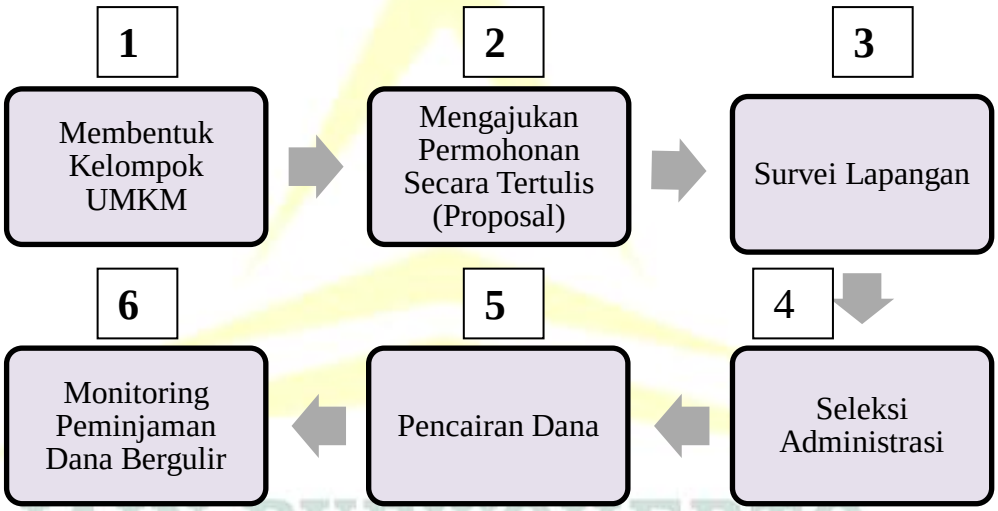

IAIN PURWOKERTO

1. Membentuk kelompok UMKM

   Dalam rangka meningkatkan kegiatan usaha ekonomi yang produktif dengan memanfaatkan bantuan pinjaman dana bergulir maka pengusaha kecil, pengusaha mikro dan pengusaha menengah membentuk kelompok UMKM, dimana pembentukan kelompok tersebut merupakan langkah awal untuk mengajukan proposal peminjaman dana bergulir dengan syarat beranggotakan minimal 10 orang dalam satu kelompok.

2. Membuat Proposal

Pemohon dana pinjaman bergulir mengajukan proposal yang dilampiri syarat-syarat sebagai berikut:

a. Mengisi formulir yang telah disediakan
b. Fotocopy KTP suami/istri
c. Fotocopy Kartu Keluarga
d. Surat pernyataan bertempat tinggal di rumah sendiri / orang tua / bukan rumah kontrak
e. Bukti kepemilikan barang jaminan, khusus bagi pemohon pelaku Usaha Kecil, dan
f. Surat Kuasa Menjual barang jaminan, khusus bagi pemohon pelaku Usaha Kecil

3. Survei Lapangan

Setelah menjadi proposal, di ajukan ke Dinas Tenaga Kerja, Kopearasi dan UKM Kabupaten Banyumas yang kemudian di verifikasi di bidang UKM, setelah melalui proses itu selanjutnya mengadakan rapat tim POKJA (kelompok kerja), kemudian disusunlah penjadwalan untuk diadakan survei ke kelompok yang sudah mengajukan peminjaman dana bergulir.

4. Seleksi Administrasi

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas selaku satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan seleksi administrasi dan menetapkan calon penerima dana pinjaman bergulir yang telah memenuhi syarat peminjaman.

5. Pencairan Dana

Setelah Tim Pokja menetapkan calon penerima bantuan modal bergulir antara Pemimpin Kegiatan dengan penerima bantuan bergulir yang diketahui pihak Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas.

a. Penerimaan bantuan bergulir yang mendapatkan persetujuan bantuan modal usaha membuka Rekening di PD. BPR BKK Purwokerto Utara

IAIN PURWOKERTO

dan BKK Patikraja, BKK Sumbang, BKK Purwokerto Selatan yang telah ditunjuk sesuai surat perjanjian.

b. Bendahara Pengeluaran mencairkan dan mentransfer dana bantuan modal bergulir melalui PD. BPR BKK Purwokerto Utara dan BKK Patikraja, BKK Sumbang, BKK Purwokerto Selatan kepada masing-masing Rekening penerima bantuan.

c. Pengembalian angsuran bantuan modal bergulir masyarakat miskin produktif sesuai jadwal angsuran, disetorkan melalui PD. BPR BKK Purwokerto Utara dan BKK Patikraja, BKK Sumbang, BKK Purwokerto Selatan yang terdapat disetiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Banyumas.

6. Monitoring Peminjaman Dana Bergulir

Setelah pencairan dana selanjutnya adalah proses pengangsuran dari kelompok UKM dan pihak Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas khususnya bidang UKM memonitoring peminjaman dana bergulir yang diberikan untuk mengatasi kredit macet dan risiko lainnya.

C. Analisis Pelaksanaan Monitoring Pada Peminjaman Dana BergulirDalam Mengatasi Kredit Macet

1. Proses Pelaksanaan Monitoring Pada Peminjaman Dana Bergulir

a. Monitoring Pada Peminjaman Dana Bergulir

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak.[83]Filosofi pengawasan dalam Islam adalah koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh seseorang dengan sangat persuasif dan edukatif. Koreksi yang persuasif dan edukatif ini dapat dilakukan dalam tiga rangkaian meliputi satu paket yaitu: *tawa shaubil haqqi*, *tawa shaubis shabri*, dan *tawa shaubil marhamah*.

[83] M. Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Bisnis syariah*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm. 152.

Pengawasan merupakan sebuah bentuk pengendalian dan cara untuk saling menasehati antar sesama atas dasar kebenaran yang disampaikan secara lisan maupun tulisan dengan tujuan meluruskan usaha yang baik demi terwujudnya kesejahteraan. Pengawasan yang dilakukan oleh Tim POKJA dari bidang UKM Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas memberikan nasihat atas dasar kebenaran dengan akad yang jelas bahwa dana yang dipinjamkan kepada kelompok UKM wajib dikembalikan, kemudian menasehtai atas dasar kesabaran bahwa Tim POKJA bidang UKM melakukan monitoring dengan mendatangi langsung kelompok peminjam dana bergulir memberikan arahan yang bersifat kekeluargaan sehingga dapat menumbuhkan sikap terbuka antar pelaku usaha mikro dengan tim monitoring, selanjutnya saling menasehati atas dasar kasih sayang dimana Tim POKJA bidang UKM kepada kelompok usaha mikro kecil yang dikunjungi agar usaha yang dilakukan oleh setiap anggotanya tetap berjalan dengan memberikan sertifikat halal pada produk para usaha mikro kecil, mengompakkan kelompok anggotanya dengan sering mengadakan pertemuan bersama serta mengikutsertakan para pelaku usaha mikro kecil pada acara festival dan pameran produk.[84]

Pengawasan atau istilah lain disebut juga monitoring dan evaluasi (monev) adalah upaya untuk melihat dan mengetahui apakah suatu pekerjaan yang dilakukan dalam suatu organisasi itu (misalnya bisnis) sudah dilakukan sesuai dengan yang direncanakan, atau apakah terjadi penyimpangan (ketidaksesuaian dengan rencana semula), apa saja yang menjadi penyebabnya, dan langkah-langkah

IAIN PURWOKERTO

[84] Wawancara langsung dengan Bapak Indra Basuki selaku *Analis Dunia Usaha Mikro Kecil dan Menengah* pada Tanggal 22 Januari 2019.

apa saja yang perlu dilakukan untuk meluruskan kembali, sehingga ada kesesuaian dengan rencana semula.[85]

Pada pengawasan yang dilakukan oleh tim POKJA dari bidang UKM kepada kelompok peminjam dana bergulir mengupayakan mendatangi desa-desa tempat tinggal kelompok UKM peminjam dana bergulir untuk mengetahui secara langsung bagaimana kondisi kelompok UKM peminjam dana bergulir dalam mengelola dana pinjamannya, untuk mengetahui apakah kelompok UKM tersebut masih rajin mengangsur pinjamannya, dan apakah kelompok UKM tersebut masih sering mengadakan pertemuan kelompok sebagai wadah untuk saling mengevaluasi antar anggota dan penguruskelompok UKM peminjam dana bergulir.Selaku pelaku tim monitoring yang bertugas menilai perkembangan usaha kelompok UKM dengan mengevaluasi dan sharing bagaimana usaha yang sedang dijalankan pelaku usaha mikro setelah mendapatkan pembiayaan pinjaman bergulir dari pemerintah baik bagaimana tingkat kelancarannya maupun kendala dan tantangan yang ada. Kelancaran dari usaha yang dijalankan pelaku usaha mikro dapat di lihat dari rajinnya para anggota dan pengurus kelompok yang mengangsur tunggakan pinjaman bergulir, dimana dana yang diterima oleh pelaku usaha mikro benar-benar difungsikan untuk mengembangkan usaha kelompok tersebut. Kemudian kendala maupun tantangan yang didapati para pelaku usaha mikro Kabupaten Banyumas yang biasanya meliputi kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola usaha karena faktor pendidikan dan keterampilan, kendala dalam memanajemen modal untuk menyediakan bahan baku karena faktor kebutuhan lain, dan kendala dalam hal memasarkan produk.

IAIN PURWOKERTO

[85] M. Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Bisnis syariah*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm. 153-154.

Sebagian besar pengusaha mikro kecil Kabupaten Banyumas lebih mengutamakan aspek produksi sehingga aspek pemasaran kurang diperhatikan khususnya dalam mencari informasi dan jaringan pasar.Kemudian tantangan lain usaha mikro kecil meliputi iklim usaha yang tidak kondusif karena persaiangan dengan pengusaha lain yang memproduksi barang sejenis di sertai kurangnya kemampuan untuk menginovasi produknya sendiri, sehingga pengusaha mikro kurang mampu bersaing dalam jaringan yang lebih luas dan berdampak pada ketidaklancaran mengangsur pinjaman dana bergulir. Selanjutnya monitoring yang dilakukan tim POKJA dari bidang UKM Kabupaten Banyumas memberikan binaan terhadap kelompok usaha mikro kecil dan menengah serta menyampaikan tungggakan yang harus dibayarkan kepada Bank Pelaksana dan ketua kelompok segera mengumpulkan anggotanya untuk memecahkan permasalahan.

Ada dua bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak perbankan dalam bidang pengawasan kredit yaitu:

1) Pengawasan dalam model *preventive control*

Pengawasan dengan model ini adalah dilakukan oleh pihak perbankan sebelum kredit tersebut dicairkan atau diberikan kepada calon debitur, tujuannya adalah guna menghindari kesalahan yang lebih fatal kemudian hari. Jadi disini akan dilihat mulai dari kelengkapan berkas yang diajukan hingga survei kelapangan seperti jaminan dan bentuk usaha yang akan dilakukan.

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak bidang UKM kepada kelompok usaha mikro kecil dan menengah Kabupaten Banyumas sebelum mencairkan pinjaman dana bergulir yaitu setelah pihak bidang UKM menerima proposal pengajuan dana bergulir dari kelompok usaha mikro kecil dan menengah yang selanjutnya dari tim pengawas membuat jadwal survei, setelah

IAIN PURWOKERTO

dibuat jadwal tim pengawassurvei ke tempat tinggal kelompok-kelompok usaha mikro kecil mengetahui susunan organisasi yang meliputi ketua, sekretaris dan anggota kelompok tersebut. Selain itu tim pengawas melakukan interview/pembiacaraan secara langsung dengan calon peminjam dana bergulir untuk memperoleh keterangan dan mengecek kebenaran data yang diterima oleh tim pengawas dari bidang UKM berupa fisik tempat usaha. Tim pengawas dari bidang UKM melakukan wawancara dengan cara pendekatan secara kekeluargaan dan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa aman dan kepercayaan dari kelompok usaha mikro kecil sebagai calon peminjam dana bergulir untuk memberikan penjelasan secara terbuka dan jujur kepada tim pengawas bidang UKM.

2) Pengawasan dengan model *repressif control*

Pengawasan dengan model ini adalah dilakukan pada saat kredit tersebut telah diberikan kepada debitur.Pengawasan disini diberikan dengan tujuan agar kreditur tersebut terbangun kedisiplinan yang kuat untuk melunasi setiap pinjamannya secara tepat waktu.[86]

Pengawasan setelah kredit peminjaman dana bergulir diberikan kepada kelompok usaha mikro kecil dan menengah Kabupaten Banyumas dilakukan oleh tim pengawas bidang UKM dengan mengunjungi langsung ketempat kelompok-kelompok usaha mikro kecil berdasarkan jadwal monitoring yang sudah ditetapkan oleh bidang UKM, monitoring yang dilakukan bertujuan untuk memantau perkembangan usaha kelompok UKMdan memastikan bahwa kelompok usaha mikro kecil disiplin dalam mengangsur tunggakan dana bergulir serta diharapkan agar tim pengawas dapat mengetahui lebih dini

[86] Irham Fahmi, *Manajemen Keuangan Perusahaan dan Pasar Modal*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm.146.

IAIN PURWOKERTO

apabila terdapat tanda-tanda penurunan kualitas sumber daya manusia, keadaan keuangan, dan *performance* usaha, melalui tanda-tanda tersebut, tim pengawas bidang UKM dapat mengambil tindakan dini untuk mencegah kredit bermasalah pada kelompok usaha mikro kecil dan menengah.

b. Metode-metode pelaksanaan monitoring

Berdasarkan data yang peneliti peroleh sampai dengan bulan April 2018 pinjaman dana bergulir mempunyai 356 kelompok UKM dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3
Data Rekap Penerimaan Angsuran Kredit Angsuran Bergulir Tahun 2007-2017

No.	JENIS KREDIT BERGULIR	PENERIMA	PINJAMAN	
			APBD	DANA BERGULIR
			Rp	Rp
1	PERORANGAN (APBD 2007)	89	300.000.000	
2	KM2P (APBD 2008)	21	250.000.000	
3	KM2P (dari hasil pengembalian angsuran)	8		160.000.000
4	KM2P (dari hasil pengembalian angsuran)	6		330.000.000
5	UMKM (APBD 2008)	18	150.000.000	
6	KM2P (APBD 2009)	40	850.000.000	
7	KM2P (APBD 2010)	54	1.000.000.000	
8	KM2P (dari hasil pengembalian angsuran)	25		480.000.000
9	UMKM (APBD 2011)	45	1.000.000.000	
10	UMKM2 (APBD 2011)	23	500.000.000	
11	UMKM 17 Juli 2012	34	1.000.000.000	
12	UMKM 20 Nopember 2012	17	500.000.000	

IAIN PURWOKERTO

13	KM2P Tahap I (APBD 2013)	37	1.000.000.000	
14	KM2P Tahap II (APBD 2013)	18	500.000.000	
15	UMKM Tahap I (APBD2017)	32	1.111.000.000	
16	UMKM Tahap II (APBD 2017)	26	1.072.500.000	
17	UMKM Tahap II (APBD 2017)	1	110.000.000	
TOTAL		**494**	**9.343.500.000**	**970.000.000**

Monitoring merupakan proses untuk menilai perkembangan (progress) usaha mikro kecil menengah Kabupaten Banyumas dengan melihat dan mengumpulkan data yang diperlukan agar pelaksanaan monitoring berada dalam kerangka yang diinginkan.

Monitoring dapat dilakukan melalui beberapa metode, yaitu sebagai berikut:

1) *On Desk Monitoring*

Proses monitoring kredit dilakukan ditempat kerja dengan mereview data berikut:

a) Anggaran perusahaan
b) Rencana kerja perusahaan
c) Neraca
d) Laporan penggunaan dana
e) Laporan perkembangan nasabah
f) Laporan kegiatan produksi / pembelian / penjualan / persediaan / piutang, dan sebagainya
g) Dokumen pengikatan agunan
h) Penggunaan fasilitas kredit
i) Limit dan baki debit fasilitas kredit
j) Jenis dan jangka waktu kredit
k) Syarat-syarat / *covenant credit*

IAIN PURWOKERTO

l) Kualitas kredit / kolektabilitas kredit[87]

2) *On Site Monitoring*

Proses monitoring dilakukan dengan kunjungan langsung kelokasi usaha debitur.Hal ini dilakukan untuk memastikan kondisi usaha debitur secara langsung.Kunjungan khusus dapat juga dilakukan dalam hal terdapat penyimpangan atas kesepakatan kredit. Proses ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara hasil on desk monitoring dengan kondisi fisik dilapangan.[88]

3) *Annual Review*

Review tahunan dilakukan terhadap seluruh fasilitas kredit debitur yang akan jatuh tempo, bank meminta kembali dokumen-dokumen terbaru dari debitur dan melakukan kembali analisis kredit, apakah kredit dapat diperpanjang atau harus dilunasi atau diperlukan restrukturisasi. Hasil analisis kredit dituangkan dalam proposal kredit untuk diajukan kembali kepada Komite kredit untuk mendapat persetujuan.[89]

Monitoring dapat dilakukantim Pokja dari bidang UKM Kabupaten Banyumas terhada kelompok usaha mikro kecil dan menegah yaitu sebagai berikut:

1) *On Desk Monitoring*

Bidang UKM selaku salah satu tim POKJA peminjaman dana bergulir meriview data proposal kelompok UKM yang telah mengajukan peminjaman dana bergulir kepada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas. Dengan

IAIN PURWOKERTO

[87] Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 81-82.

[88] Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 82.

[89] *Ibid*..., hlm. 82-83.

masuknya proposal pengajuan peminjaman dana bergulir dari kelompok UKM Banyumas petugas dari bidang UKM menseleksi dari proposal yang telah masuk apakah proposal tersebut sudah memenuhi persyaratan peminjaman dana bergulir atau belum, yang selanjutnya dibuat schedule survei lapangan daerah kelompok UKM pengaju peminjaman dana bergulir.

Bagi kelompok UKM yang menerima dana peminjaman dana bergulir diwajibkan membuka rekening baru di BPR BKK di daerah terdekatnya untuk akses penerimaan pencairan serta pengangsuran dana bergulir yang selanjutnya di laksanakan oleh kelompok UKM penerima dana bergulir. BPR BKK sebagai lembaga yang bekerjasama dengan program peminjaman dana bergulir menyerahkan laporan perkembangan angsuran setiap bulan kepada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas. Dimana laporan angsuran peminjaman dana bergulir itu secara online, BKK masing-masing kecamatan melaporkan ke BPR BKK pusat dan dibukukukan menjadi satu.

Bidang UKM meriview data berdasarkan laporan dari BPR BKK mengetahui lancar, kurang lancar dan macetnya angsuran kelompok UKM tertentu yang di cek perkecamatan dan dari tahun peminjamannya.

IAIN PURWOKERTO

2) *On Site Monitoring*

Untuk pelaksanan monitoring bantuan modal bergulir masyarakat miskin yang produktif dilakukan oleh petugas dari Dinas Tenaga Keja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas dalam hal ini bidang UKM dan petugas pendamping atau Tim Pokja Kabupaten Banyumas.

Pelaksanaan monitoring yang dilakukan bidang UKM kepada kelompok peminjam dana bergulir yaitu:

a) Membuat schedule atau penjadwalan kelompok yang akandikunjungi, terutama kelompok yang sudah menerima

pinjaman dana bergulir baik yang lancar maupun tidak lancar, dari penjadwalan tersebut tim monitoring tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada kelompok yang akan dikunjungi karena sifatnya hanya melaksanakan agenda monitoring yang sudah dijadwalkan.

b) Menanyakan kelengkapan admistrasi, yang meliputi:

1)Buku tamu

2)Buku daftar anggota

3)Buku kegiatan

4)Notulen kegiatan

5)Buku kendali angsuran

6)Stempel kelompok

c) Menilai dari segi kegiatan atau usaha

Dalam hal ini yang dilakukan tim monitoring adalah menanyakan operasional usaha kelompok UKM peminjam dana bergulir apakah masih berjalan atau tidak. Bagi mereka kelompok UKM penerima pinjaman dana bergulir yang kategorinya lancar, sudah pasti kegiatan usahanya berjalan dengan baik begitupun sebaliknya.

d) Membuat risalah kegiatan

Setelah mendapat sumber atau masukan dari hasil monitoring, kemudian membuat risalah kegiatan monitoring sebagai salah satu laporan autentik kepada pimpinan yang isinya bahwa tim monitoring telah melaksanakan monitoring penerima pinjaman dana bergulir.

e) Persyaratan kebutuhan pencatatan pelaporan

Pelaksanaan monitoring yang dilakukan tim monitoring dengan mendatangi kelompok UKM di desa-desa sesuai dengan yang sudah terjadwalkan, selanjutnya diadakan rapat atau diskusi yang antara lain mebahas dan mensikapi kelompok penerima pinjaman dana bergulir yang kategori

IAIN PURWOKERTO

baik, dimana kategori baik itu berarti mereka memiliki usaha yang benar-benar berjalan atau memiliki produksi yang mampu dipasarkan.[90]

3) *Annual Review*

Bidang UKM menerapkan dan menjalankan sistem peminjaman dana brgulir sesuai akad kredityang di ajukan oleh kelompok UKM pengaju dana bergulir, misalnya akad kreditnya 3 tahun berarti 3 tahun jangkawaktu peminjaman dana bergulirnya, karena sudah disahkan Bupati. apabilakelompok UKM peminjam dana bergulir yang sudah melunasi angsuran peminjaman dan kelompok tersebut ingin mengajukan kembali, maka kelompok tersebut harus melakukan proses peminjaman mulai dari awal kembali.[91]

2. Mengatasi Kredit Macet

Untuk mendukung pemberian kredit peminjaman dana bergulir yang sehat mulai dari tahap awal proses kegiatan pemberian perkreditan sampai dengan kredit yang bersangkutan lunas, maka pihak pengawas dari bidang UKM menetapkan struktur organisasi serta tugas dan tanggung jawab masing-masing pelaksana yang terkait dalam proses pemberian kredit seperti kepala bidang usaha mikro kecil dan menengah, kasi pengembangan usaha kecil mikro dan menengah, kasi perlindungan usaha mikro kecil dan menengah, kasi fasilitasi dan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah, analis dunia usaha, pengadministrasian umum, dan staf bidang usaha mikro kecil dan menengah dan atau satuan-satuan kerja perkreditan dana bergulir.

Dalam membuat pedoman kebijakan persetujuan pemberian kredit sekurang-kurangnya mencangkup antara lain konsep hubungan total pemohon kredit dengan bank, penetapan batas wewenang putusan

[90] Wawancara langsung dengan Bapak Indra Basuki selaku *Analis Dunia Usaha Mikro Kecil dan Menengah* pada Tanggal 28 Juni 2018.

[91] Wawancara langsung dengan Ibu Rozani Umdati selaku *Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah* pada Tanggal 4 Desember 2018.

IAIN PURWOKERTO

kredit dari setiap pejabat, tanggung jawab pejabat pemutus kredit, pedoman proses persetujuan kredit, pedoman pembuatan perjanjian kredit dan persetujuan pencairan kredit.[92]

Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang disalurkan melalui Bank Perkreditan Rakyat BKK Purwokerto Utara selaku bank penyalur. PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Purwokerto Utara selaku bank penyalur juga bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah menerima dan menagih pengembalian dana pinjaman bergulir. Pada kebijakan persetujuan pemberian pinjaman dana bergulir yang di lakukan oleh Tim Pokja Bantuan Modal Bergulir memfasilitasi kredit peminjaman dana bergulir kepada kelompok-kelompok usaha mikro kecil dengan menjumlahkan total kredit sebagai bentuk acuan batas maksimal pemberian kredit, hal ini berkaitan dengan besarnya risiko yang di hadapi oleh Tim Pokja. Setelah Tim Pokja menetapkan calon penerima bantuan modal bergulir, bagi kelompok usaha mikro kecil melakukan penandatanganan perjanjian pemberian bantuan pinjaman modal bergulir dengan Pemimpin Kegiatan yang diketahui oleh pihak Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas.

Ketentuan-ketentuan pokok Dana Pinjaman Bergulir:

a. Pembentukan TIM POKJA

Untuk melaksanakan kegiatan penyaluran pinjaman dana kredit bergulir untuk masyarakat miskin yang produktif Kabupaten Banyumas, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas membentuk Tim POKJA yang anggotanya terdiri dari Dinas/Instansi terkait.

IAIN PURWOKERTO

[92] Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN, 2003), hlm.106.

b. Jenis Bantuan

Adalah berupa pinjaman modal yang diberikan dalam bentuk kredit bergulir untuk masyarakat miskin produktif dalam wilayah Kabupaten Banyumas.

c. Besarnya Bantuan

Pinjaman modal yang diberikan dalam bentuk kredit bergulir untuk masyarakat miskin produktif setinggi-tingginya Rp. 5.000.0000,-(lima juta rupiah) per orang/usaha kecil mikro, baik perorangan atau kelompok.

d. Jangka Waktu Pengembalian

Jangka waktu pengembalian kredit bergulir untuk masyarakat miskin produktif adalah selama 24 (dua puluh empat) bulan.

e. Jasa Pembinaan

Setiap penerimaan kredit bergulir untuk masyarakat miskin produktif dikenakan jasa pembinaan sebesar 4 % (empat perseratus) per tahun dari total pinjaman yang diterima:

1) Untuk jasa Bank penyalur sebesar 3 %

Dengan rincian penggunaaan:

- Keuntungan/laba Bank penyalur sebesar ……2 %
- Jasa pembinaan dan pengawasan Debitur sebesar 1 %

2) Untuk PAD Kabupaten Banyumas sebesar 1 %

f. Bank penyalur

Untuk penyalur dan sekaligus menerima pengembalian angsuran kredit bergulir untuk masyarakat miskin yang produktif Tahun Anggaran 2008 ditunjuk sebagai Bank penyalur adalah :

1) PD. BPR. BKK. PURWOKERTO UTARA
2) PD. BKK. PATIKRAJA
3) PD. BKK. PURWOKERTO SELATAN

IAIN PURWOKERTO

4) PD. BKK. SUMBANG

g. Rekening yang diperlukan

Untuk mempermudah penyaluran dan penerimaan kembali angsuran serta pemindahan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam angka3 dan angka 5 huruf b, kepada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas diwajibkan membuka 2 (dua) macam rekening :

1) Rekening atas nama Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas sebagai tempat penampungan sementara untuk menyalurkan dan menerima pengembalian angsuran yang terdiri dari angsuran pokok dan jasa.
2) Angsuran atas nama PAD Kabupaten Banyumas sebagai tempat penampungan PPendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari jasa pinjaman 1 % (satu per seratus) per tahun.

h. Pengguliran kredit

Untuk memperluas penyebaran pinjaman kredit bergulir untuk masyarakat miskin yang produktif, Tim POKJA sewaktu-waktu dapat menggulirkan kembali atas pengembalian pokok angsuran yang diterima setiap bulan yang di bukukan dalam rekening sebagaimana dimaksud angka 7 huruf a.[93]

IAIN PURWOKERTO

Walaupun semua tahapan-tahapan dalam proses pemberiankredit dana pinjaman bergulir telah dilakukan secara hati-hati dan telah dilakukan pengawasan dan pembinaan kredit secara berkesinambungan, namun demikian tidak seratus persen angsuran kredit dana pinjaman bergulir lancar.

Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank

[93] Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penyaluran Pinjaman Dana kredit Bergulir Untuk Masyarakat Miskin yang Produktif Dalam Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun Anggran 2008.

seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit.Kredit bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan kredit yang digolongkan kedalam kolektabilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M).[94]

Penanganan kredit bermasalah yang dapat dilakukan oleh Tim POKJA bidang UKM antara lain:

a. *Rescheduling*

Rescheduling merupakan suatu tindakan untuk memperpanjang jadwal cicilan pokok kredit. Penjadwalan kembali dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran kredit.[95] Pelaksanaan monitoring yang dilakukan Tim POKJA bidang UKM kepada kelompok usaha mikro kecil yang mengalami kemacetan dalam mengangsur pinjaman dana bergulir memberi kesempatan mengangsur kembali dengan meminta kelompok usaha mikro kecil untuk membuat surat pernyataan kesanggupan mengangsur kembali pinjaman dana bergulir dan pada proses pengangsuran tidak ada paksaan dari Tim POKJA terkait batas maksimal pengangsuran, jadi sesuai kemampuan pelaku usaha mikro kecil dalam mengangsur kembali pinjamannya.[96]

b. *Reconditioning*

Reconditioning merupakan metode penyehatan kredit, yaitu bank melakukan perubahan beberapa persyaratan yang berlaku seperti tercantum pada perjanjian kredit seperti:

1) Kapitalisasi bunga, yaitu kewajiban dan tunggakan bunga dijadiakn utang pokok.
2) Penundaan pembayaran bunga sampai jangka waktu tertentu.

---

[94] Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm.81-82.

[95] Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 98.

[96] Wawancara langsung dengan Bapak Indra Basuki selaku *Analis Dunia Usaha Mikro Kecil dan Menengah* pada Tanggal 22 Januari 2019.

IAIN PURWOKERTO

3) Penurunan suku bunga kredit.

4) Pembebasan tunggakan bunga dsb.[97]

Pelaksanaan monitoring yang dilakukan Tim POKJA bidang UKM dalam menangani pelaku usaha mikro kecil yang mengalami kemacetan dalam mengangsur pinjaman tidak melakukan perubahan seperti kaptalisasi bunga, penurunan suku bunga dan pembebasan suku bunga melainkan meringankan proses angsuran, contoh pada pelaku usaha mikro kecil yang seharusnya mengangsur sebesar Rp. 1.500.000,- menjadi Rp. 500.000,- sampai pelaku usaha mikro peminjam dana bergulir lunas dalam pengangsuran.[98]

c. *Restructuring*

Merupakan tindakan bank kepada nasabah, anatara lain dengan cara memberikan kredit tambahan pada nasabah, dengan pertimbangan misalnya nasabah memang membutuhkan tambahan dana agar dapat mengatasi permasalahan, dan usaha yang dibiayai masih dinilai layak untuk dilanjutkan.[99]

Pelaksanaan monitoring yang dilakukan Tim Pokja bidang UKM dalam menangani kredit bermasalah tidak memberikan kredit tambahan dalam jumlah berapapun kepada kelompok usaha mikro kecil peminjam dana bergulir.[100]

d. *Kombinasi*

Merupakan *kombinasi* dari upaya *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.[101] Pelaksanaan monitoring yang dilakukan Tim POKJA bidang UKM tidak melakukan metode *kombinasi*, akan tetapi

IAIN PURWOKERTO

---

[97] Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 98.

[98] Wawancara langsung dengan Bapak Indra Basuki selaku *Analis Dunia Usaha Mikro Kecil dan Menengah* pada Tanggal 22 Januari 2019.

[99] Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 98.

[100] Wawancara langsung dengan Bapak Indra Basuki selaku *Analis Dunia Usaha Mikro Kecil dan Menengah* pada Tanggal 22 Januari 2019.

[101] Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1*..., hlm. 98.

dalam menangani kredit bermasalah memiliki prosedur tersendiri, sehingga metode *kombinasi* tidak pernah diterapkan dalam menangani kredit bermasalah pada peminjaman dana bergulir.

f. *Likuidasi* Jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai iktikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua kewajibannya.[102]

Kredit dana pinjaman bergulir yang diberikan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah Kabupaten Banyumas apabila mendapati kelompok usaha mikro kecil yang bermasalah dalam angsuran maka penerima dikenakan denda tunggakan sebesar 1% per bulan dari jumlahpinjaman yang diterima, apabila penerima tidak tidak memenuhi ketentuan yang ada, maka Tim Pokja sewaktu-waktu dapat mencabut dan memindahkan ke UKM lain, kemudian apabila usaha mikro kecil penerima bantuan modal bergulir sampai saat jatuh tempo pengembalian/pelunasan tidak dapat membayar keseluruhan tunggakan bantuan modal bergulir, untuk melunasi bantuan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah.[103]

D. Upaya Bidang UKM Dalam Mengatasi Kredit Macet

Pengembalian dana pinjaman bergulir dilakukan dengan cara mengangsur yang terdiri dari pokok angsuran ditambah jasa pinjaman. Berikut data kolektabilitas angsuran pinjaman per 30 April 2018:

IAIN PURWOKERTO

[102] Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 98.

[103] Dikutip dari Peraturan Bupati Banyumas Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Penyaluran Dana Bergulir Untuk Masyarakat Miskin yang Produktif Kabupaten Banyumas Tahun 2007.

Tabel 4
Rekap Pinjaman Berdasar Kolektabilitas
30 April 2018

No.	Pengelompokan	Bakidebet								NPL
		Lancar	Jml Rek	Kurang Lancar	Jml Rek	Diragukan	Jml Rek	Macet	Jml Rek	
1.	KANTOR PUSAT OPERASIONAL	0	0	0	0	0	0	370.610.763	52	100.00
2.	KANTOR CABANG PURWOKERTO BARAT	115.784.337	3	91.666.536	1	0	0	93.169.317	13	61.48
3.	KANTOR CABANG PURWOKERTO TIMUR	82.515.610	4	66.500.000	2	0	0	27.222.012	5	53.18
4.	KANTOR CABANG KARANGLEWAS	0	0	24.916.333	1	0	0	116.128.380	13	100.00
5.	KANTOR CABANG PEKUNCEN	18.055.547	1	0	0	0	0	45.217.600	13	71.46
6.	KANTOR CABANG KALIBAGOR	66.183.335	2	0	0	0	0	29.464.000	6	30.80
7.	KANTOR CABANG SOKARAJA	21.770.169	1	28.333.166	1	0	0	152.548.800	12	89.26

IAIN PURWOKERTO

8.	KANTOR CABANG WANGON	0	0	0	0	0	0	54.576.200	7	100.00
9.	KANTOR CABANG GUMELAR	16.250.000	1	0	0	0	0	23.198.745	7	58.81
10.	KANTOR CABANG RAWALO	76.040.367	3	0	0	0	0	62.684.000	10	45.19
11.	KANTOR CABANG KEMBARAN	174.866.342	7	0	0	0	0	160.004.368	18	47.78
12.	KANTOR CABANG KEBASEN	0	0	0	0	0	0	39.298.800	5	100.00
13.	KANTOR CABANG PURWOJATI	22.912.666	1	0	0	0	0	23.591.069	6	50.73
14.	KANTOR CABANG LUMBIR	31.666.665	1	0	0	0	0	6.377.600	2	16.76
15.	KANTOR CABANG JATILAWANG	108.298.332	3	0	0	0	0	29.926.800	4	21.65
16.	KANTOR CABANG TAMBAK	59.371.650	3	21.600.000	1	0	0	8.641.488	3	33.75
17.	KANTOR CABANG SUMPIUH	43.666.664	1	0	0	0	0	82.648.400	9	65.43

IAIN PURWOKERTO

18.	KANTOR CABANG KEMRANJEN	144.661.343	5	0	0	0	0	125.506.575	15	46.46
19.	KANTOR CABANG AJIBARANG	31.666.665	1	0	0	0	0	146.345.100	23	82.21
20.	KANTOR CABANG CILONGOK	31.416.663	2	0	0	0	0	332.268.728	22	91.36
21.	KANTOR CABANG SOMAGEDE	0	0	0	0	0	0	113.159.300	9	100.00
22.	KANTOR CABANG BANYUMAS	31.330.340	1	0	0	0	0	87.077.100	11	73.54
23.	KANTOR CABANG KEDUNGBANTENG	61.360.866	2	0	0	0	0	113.173.656	13	64.84
24	KANTOR CABANG BATURADEN	209.743.832	7	0	0	20.000.000	1	63.982.050	10	28.59
25	KANTOR CABANG HR. BOENYAMIN	30.833.337	2	0	0	0	0	24.840.827	4	44.82
		1.378.394.730	51	233.016.035	6	20.000.000	1	2.331.661.678	292	65.22

IAIN PURWOKERTO

Pengembalian pinjaman bergulir diklasifikasikan menjadi:

1) Lancar, yaitu apabila membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman tepat waktu tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati
2) Kurang lancar, yaitu apabila membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman telah melampaui tanggal jatuh tempo seharusnya angsuran dibayar tetapi belum melampui 3 (tiga) kali tidak membayar angsuran secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati
3) Diragukan, yaitu apabila tidak membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali angsuran secara berturut-turut, tetapi belum melampui 9 (sembilan) kali tidak membayar angsuran secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati
4) Macet, yaitu apabila tidak membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sebanyak lebih dari 9 (Sembilan) kali secara berturut-turut, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
5) Bermasalah, yaitu apabila tidak membayar sama sekali angsuran pokok dan jasa pinjaman yang telah melampui jatuh tempo yang seharusnya lunas dibayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati

Peran tim monitoring bidang UKM dalam mensikapi kelompok UKM peminjam dana bergulir yang masuk pada klasifikasi lancar, dalam hal ini kelompok tersebut memiliki usaha yang benar-benar berjalan serta memiliki produksi yang dipasarkan, kemudian tim monitoring bidang UKM selanjutnya melakukan pengembangan dan memfasilitasinya dengan mengikutsertakan kegiatan pameran UKM di Kabupaten dan setingkat Propinsi Jawa Tengah, dengan mengikutkan agenda tersebut bisa dijadikan media promosi bagi produksi UKM di Kabupaten Banyumas. [104]

[104] Wawancara Langsung dengan Bapak Indra Basuki selaku Analis Dunia Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Tanggal 28 Juni 2018.

Pinjaman dana bergulir dengan klasifikasi macet yaitu apabila kelompok UKM peminjam dana bergulir tidak membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sebanyak lebih dari 9 (Sembilan) kali secara berturut-turut, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Tim monitoring bidang UKM yang terjadi karena peminjam meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang bersedia menanggung hutangnya, gagal usaha akibat bencana alam atau kerusuhan, dapat dilakukan pemindahbukuan dalam pos pinjaman bermasalah tanpa proses pemulihan pinjaman.

Cara mengatasi kredit bermasalah yaitu dengan mengetahui faktor-faktor penyebab kredit menjadi bermasalah, kemudian bank harus mempunyai sistem pengenalan secara dini kredit bermasalah, selanjutnya pengeloalaan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan cara penetapan strategi pengelolaan kredit bermasalah dan rencana tindak lanjut atas kredit-kredit ynag menjadi bermasalah tersebut. Penetapan strategi pengelolaan kredit bermasalah dilakukan setelah melalui proses analisa dan evaluasi yang meliputi kelengkapan dokumen, riwayat hubungan bank dengan debitur, investigasi untuk mengetahui keadaan/ kondisi debitur saat ini. Berdasarkan langkah tersebut dapat diketahui posisi bank terhadap debitur, sehingga dapat ditetapkan alternatif penyelesaian kredit bermasalah.Pemilihan dan penetapan strategi kahir didasarkan pada hasil negosiasi dengan debitur. Alternative pilihan yang dapat dilakukan dalam upaya menyelesaikan kredit bermasalah antara lain: pengawasan, restrukturisasi, dan penyelesaian kredit.[105].

Langkah tim monitoring bidang UKM dalam mengatasi kelompok peminjam dana bergulir yang macet antara lain:

1) Mencari informasi mengenai sebab kelompok UKM peminjam dana bergulir mengalami kemacetan dengan cara mengurai usut yang ada

[105] Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN, 2003), hlm. 115.

didalam kelompok tersebut, dimana faktor kemacetan itu ada 2 sebab yaitu:

a) Macet di anggota, kemacetan di anggota berarti anggota tidak mengangsur tunggakan pinjaman kepada pengurus.
b) Macet di pengurus, ketika kemacetan berada dipengurus berarti anggota kelompok tersebut rajin mengangsur namun sesampainya dipengurus tidak disetorkan.

2) Memberi surat pemberitahuan kepada kelompok UKM bahwa pinjamannya bermasalah atau macet, petugas dari bidang UKM mengeluarkan surat supaya mengaktifkan dan mengangsur kembali pinjaman dana bergulir, ketika surat itu tidak di respon oleh kelompok UKM yang bersangkutan maka kelompok UKM tersebut di panggil ke kantor Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM untuk mengaktifkan angsuran kembali, kalau tidak bisa maka tim POKJA dari bidang UKM datang kelokasi.
3) Kemudian tim monitoring bidang UKM memberi motivasi kepada kelompok UKM yang mengalami macet angsuran dengan:
   a) Meminta pengurus agar segera membuat surat pernyataan untuk kembali mengangsur ke BPR/BKK, berikut contoh surat pernyataan yang dibuat oleh kelompok usaha mikro kecil yang mengalami kredit macet untuk menyanggupi mengangsur kembali pinajaman dana bergulirnya:

IAIN PURWOKERTO

Gambar 2

Surat Pernyataan

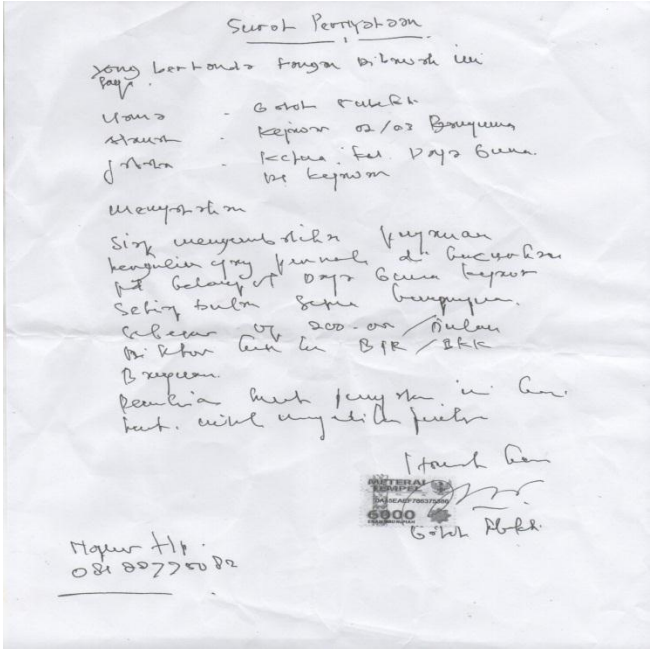

Surat Pernyataan

yang bertanda tangan di bawah ini saya.

Nama - Gatot Pakeh
Alamat - Kejawan 02/03 Banyumas
Jabatan - Ketua Kel. Dana Guna Ds Kejawan

Menyatakan

Saya menyanggupi pinjaman kengulian yang pernah di Gucurkan pada Kelompok Dana Guna Kejawan Setiap bulan sepuluh Banyumas.
Sebesar Rp 200.000 / Bulan
Di Kali Tanggal 10 BIR / BKK
Banyumas.
Demikian surat pernyataan ini saya buat. untuk mengadakan perlu

Hormat saya

METERAI TEMPEL
6000

Gatot Pakeh

Nomor Hp :
081 807750 82

Sumber : Arsip Data Bidang UKM Kabupaten Banyumas

b) Meminta kembali mengaktifkan kegiatan kelompok peminjam dana bergulir

c) Melakukan monitoring dua kali dalam satu bulan bagi pelaku peminjam dana bergulir[106]

Upaya penanganan kredit macet oleh tim POKJA dari bidang UKM yang lebih bersifat kekeluargaan dengan tidak mengandung unsur pemaksaan pada kelompok peminjam dana bergulir, melainkan ketegasan berupa pembuatan surat pernyataan untuk mengangsur kembali sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku serta perhatian khusus dengan menambahkan jadwal monitoring pada pelaku usaha mikro kecil yang mengalami macet dalam pengangsuran peminjaman dana bergulir.

[106] Wawancara langsung dengan Ibu Rozani Umdati selaku *Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah* pada Tanggal 4 Desember 2018.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan data-data dan informasi yang diperoleh dari penelitian ini serta hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dengan membandingkan antara teori dan praktik, maka dapat disimpukan bahwa pelaksanaan monitoring pada peminjaman dana bergulir dalam mengatasi kredit macet di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kabupaten Banyumas yang dilakukan oleh bidang UKM sudah cukup baik dan sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha kecil mikro sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan baik dalam pengembalian angsuran pinjaman maupun perkembangan usaha mikro kecil di Kabupaten Banyumas, dengan metode pengawasan sebelum dan sesudah pencairan kredit pinjaman dana bergulir bagi kelompok usaha mikro kecil sehingga menumbuhkan kepercayaan, kemandirian, serta pengidentifikasian kelemahan yang terjadi dalam proses pemberian kredit serta pencairan solusi atas kelemahan atau kekurangan kredit bisa tersampaikan. Pengawasan yang dilakukan timPokja bidang UKM mampu meningkatkan efektivitas efisiensi dalam setiap tahap pemberian kredit sehingga perencanaan kredit kelompok usaha mikro kecil menengah dapat dilaksanakandenganbaik.
2. Upaya yang dilakukan bidang UKM dalam mengatasi kredit macet yaitu dengan melakukan pendampingan kepada kelompokusaha mikro kecil peminjam dana bergulirmenggali informasi sebab kemacetan yang dialami kelompok tersebut, yang selanjutnya memberikan alternatif masukan/solusi yang dapat membantu kelompok usaha mikro kecil keluar dari permasalahan usaha yang dialaminya. Selain itu tim POKJA bidang UKM melakukan aktivitas monitoring dan penagihan secara intensif terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

IAIN PURWOKERTO

B. Saran

1. Tim POKJA khususnya Bidang UKM Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas dalam melakukan observasi dalam menentukan calon peminjam dana bergulir harus benar-benar memperhatikan dan memastikan riwayat usaha yang dijalankan calon kelompok peminjam dana bergulir, serta memastikan personal dari calon kredit dengan menanyakan kepribadian calon kepada masyarakat sekitar tempat tinggal calon kredit agar pengguliran dana tepat sasaran.
2. Bidang UKM Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan monitoring pada peminjaman dana bergulir perlu memperhatikan kendala seperti kunjungan monitoring yang dilakukan tetapi tidak bertemu dengan kelompok yang dituju sehingga perlu adanya pemberitahuan atau pengumuman sebelumnya kepada kelompok UKM peminjam dana bergulir agar pelaksanaan monitoring dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.
3. Peran bidang UKM Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas dalam mengatasi kredit macet perlu menambahkan beberapa hal dengan sistem perkenalan dini kredit masalah sebelum menindak lanjuti kasus kredit macet.
4. Perlunya mempertimbangkan berbagai metode yang memungkinkan banyak pihak dapat mengakses laporan hasil evaluasi sebagai bentuk pemanfaatan hasil laporan dan juga pada saat yang sama menjaga kerahasiaan narasumber dan informasi tertentu yang mungkin diperuntukan untuk konsumsi pihak tertentu.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim, Achmad Tjahjono dan Muh. Fakhri Husein, 2003. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan.

Anselm Strauss dan Juliet Corbin, 2003.*Dasar-dasar Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, 2005, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani.

Fuad Mohd Fachruddin, 1993. *Riba dalam Bank, Koperasi, perseroan dan Asuransi*, Bandung: PT Alma'arif.

Ikatan Bankir Indonesia, 2015.*Manajemen Risiko 1*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Ikatan Bankir Indonesia, 2016.*Manajemen Risiko*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Ikatan Bankir Indonesia, 2018.*Bisnis Kredit Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Irham Fahmi, 2014. *Manajemen Keuangan Perusahaan dan Pasar Modal*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Kasmir, 2010.*Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: PRENADAMEDIA.

Lembaga Administrasi Negara, 2005. *Monitoring dan Evaluasi*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lexy J. Moleong, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Maryanto Supriyono, 2011. *Buku Pintar Perbankan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Moh.Kasiram, 2010.*Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Yogyakarta: UIN Maliki Press.

Muhamad, 2016.*Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

IAIN PURWOKERTO

M. Ma'ruf Abdullah, 2014. *Manajemen Bisnis syariah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Sondang P. Siagian, 1998. *Manjaemen Stratejik*. Jakarta: Bumi Aksara.

State Audit Reform-Sector Development Program, 2007.*Prosedur Kerja Audit Berdasarkan Standar Internasional*. Jakarta: PT Nusa Consultant.

Sugiyono, 2017.*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Suhardjono, 2003.*Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN.

Sukandarrumidi, 2012.*Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Tim Penyusun, 2012. *Panduan Penulisan Skripsi STAIN Purwokerto*. Purwokerto: STAIN Press.

Usman Efendi, 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wawan Dhewanto dkk, 2015.*Manajemen Inovasi untuk Usaha Kecil dan Mikro*, Bandung: Alfabeta.

NON BUKU

IAIN PURWOKERTO

Achma Hendra Setiawan, Tri Wahyu Rejekiningsih, "Dampak Program Dana Bergulir Bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM)", (Aset Vol. 11 No. 2, *Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro*, 2009.

Andri Yuni Astuti, "Pinjaman Bergulir, Kredit Macet. Serta Efek Moderasi Pendampingan". (Upajewa Dewantara, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, t.t).

Arum Novianita Witanti, dkk, "Evaluasi Pengawasan Pemberian Kredit Modal Kerja Sebagai Upaya Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah Di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero), Tbk Cabang Pembantu Wates Kabupaten Kediri", Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 40 No. 2, Universitas Brawijaya Malang, 2009.

Candri Maharani Puspitasari, “Studi Efektifitas Dana Bergulir Pada Usaha Mikro di Kota Kendari”, Skripsi, Kendari: Halu Oleo, Kendari, 2016.

Chintya Fibri Asmara, “Implementasi Bantuan Dana Bergulir Bagi Pelaku Usaha”, Naskah Publikasi, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2018.

Dahnil Soekarno Hatta, “Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat”, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

Dita Wulandari, “Monitoring dan Evaluasi Distribusi Zakat Pada Yatim Mandiri Yogyakarta”, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2015.

Dokumen Bidang UKM (Blangko Permohonan Dana Bergulir)

Gde Dianta Yudi Pratama, “Penyelesaian Kredit Macet pada KSU. Tumbuh Kembang”, Skripsi, Denpasar: Universitas Udayana Denpasar, 2015.

Husin Kusuma Wijaya, “Dampak Dana Bergulir Syariah (DBS) Pada Kinerja Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)”, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Jamal Abdul Aziz, “Ekonomi Islam Minus Pengharaman Bunga”. Penyunting: Ahmad Dahlan, Vol.2 Purwokerto: Asosiasi Dosen Ekonomi Islam (ADEIS), 2014.

Kutipan dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas, Bab I, Pasal 1, Nomor 5.

Kutipan dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas, Bab IV, Pasal 14.

Kutipan dari Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penyaluran Pinjaman Dana kredit Bergulir Untuk Masyarakat Miskin yang Produktif Dalam Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun Anggran 2008.

IAIN PURWOKERTO

Kutipan dari Peraturan Bupati Banyumas Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Penyaluran Dana Bergulir Untuk Masyarakat Miskin yang Produktif Kabupaten Banyumas Tahun 2007.

Nurmi Yulis, "Pemanfaatan Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar", (Jom FISIP Vol. 4 No. 1, Pekanbaru, 2017.

Renstra Dinnakerkop UKM Banyumas.

Sri Luli Rizkiana, "Pelaksanaan Monitoring Pembiayaan Murabahah Warung Mikro Guna Meminimalisir Risiko di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kedoya", Skripsi, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017.

Ulifata Ni'mah, "Pelaksanaan Monitoring Sebagai Upaya Preventative Terhadap Kolektabilitas Pembiayaan Murabahah Di PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru", Skripsi, Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2015.

V. Wiratna Sujarweni, Lila Retnani Utami, "Analisis Dampak Pembiayaan Dana Bergulir KUR (Kredit Usaha Rakyat) Terhadap Kinerja UMKM", Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) Vol. 22 No.1, *Universitas Respati Yogyakarta*, 2015.

Wawancara langsung dengan Bapak Indra Basuki selaku *Analis Dunia Usaha Mikro Kecil dan Menengah* pada Tanggal 28 Juni 2018.

Wawancara langsung dengan Ibu Rozani Umdati selaku *Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah* pada Tanggal 4 Desember 2018.

W Nur, 2012. "kajian Pustaka Pengertian Kredit Macet," eprints.uny.ac.id, diakses 26 April 2018.

IAIN PURWOKERTO